

**ANALISIS *CHINESE EXCEPTIONALISM*: PERAN BRI DALAM
MEMPERKUAT *CHINESE EXCEPTIONALISM* PADA TIONGKOK
KONTEMPORER (2013-2023)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD RIZKY MUBARAK

21323092

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**ANALISIS *CHINESE EXCEPTIONALISM*: PERAN BRI DALAM
MEMPERKUAT *CHINESE EXCEPTIONALISM* PADA TIONGKOK
KONTEMPORER (2013-2023)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUHAMMAD RIZKY MUBARAK

21323092

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

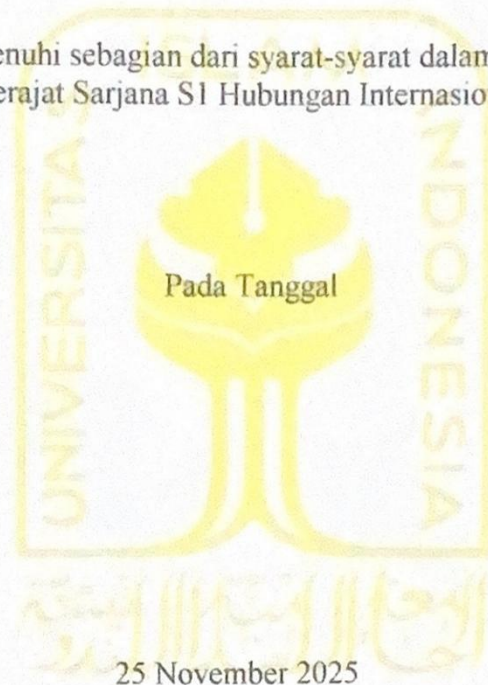
2025

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS *CHINESE EXCEPTIONALISM*: PERAN BRI DALAM MEMPERKUAT *CHINESE EXCEPTIONALISM* PADA TIONGKOK KONTEMPORER (2013-2023)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 2 Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.I.P., M.A.
- 3 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.

Tanda Tangan

Karina
Ayu Heryati Naqsabandiyah
Rizki Dian Nursita

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

7 November 2025



Muhammad Rizky Mubarak

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	9
1.7 Argumen Sementara.....	12
1.8 Metode Penelitian.....	12
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	12
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	13
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	13
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	13
1.9 Sistematika Pembahasan	13
BAB 2 NARASI TIONGKOK ATAS <i>BELT AND ROAD INITIATIVE</i> DAN REALITAS IMPLEMENTASI PADA NEGARA MITRA	15
2.1. Upaya Tiongkok Memperoleh Status Kekuatan Besar	15
2.2. Upaya Tiongkok Menciptakan Perdamaian Global	23
2.3. Upaya Tiongkok Mewujudkan Keterlibatan Inklusif Berbagai Pihak..	29
BAB 3 ANALISIS MANIFESTASI <i>CHINESE EXCEPTIONALISM</i> PADA BRI	35
3.1. <i>Great Power Reformism</i>	35
3.2. <i>Benevolent Pacifism</i>	48
3.3. <i>Harmonious Inclusionism</i>	59
BAB 4 PENUTUP.....	72

4.1	Kesimpulan	72
4.2	Rekomendasi.....	75
DAFTAR PUSTAKA		76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perspektif Historis dari Chinese Exceptionalism.....	9
Tabel 2. Hasil Analisis Komponen Great Power Reformism Pada BRI.....	43
Tabel 3. Hasil Analisis Komponen Benevolent Pacifism Pada BRI.....	55
Tabel 4. Hasil Analisis Komponen Harmonious Inclusionism Pada BRI	66
Tabel 5. Hasil Analisis Narasi Chinese Exceptionalism Pada BRI	73

DAFTAR SINGKATAN

AIIB	: <i>Asian Infrastructure Investment Bank.</i>
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
BRF	: <i>Belt and Road Forum for International Cooperation.</i>
BRI	: <i>Belt and Road Initiation.</i>
CCCC	: <i>China Communications Construction Company.</i>
CE	: <i>Chinese Exceptionalism.</i>
CELAC	: <i>Community of Latin America and Caribbean States.</i>
CFR	: <i>Council on Foreign Relations.</i>
CGD	: <i>Center for Global Development.</i>
COPHC	: <i>China Overseas Port Holding Company</i>
CPEC	: <i>China-Pakistan Economic Corridor.</i>
CPIC	: <i>China Power Investment Corporation.</i>
CRC	: <i>China Railway Construction.</i>
CRBC	: <i>China Road and Bridge Corporation.</i>
CSIS	: <i>Center for Strategic and International Studies.</i>
DSF	: <i>Belt and Road Debt Sustainability Framework.</i>
GDI	: <i>Global Development Initiative.</i>
GSI	: <i>Global Security Initiative.</i>
ICIJ	: <i>International Consortium of Investigative Journalist.</i>
PBoC	: <i>People's Bank of China.</i>
PGII	: <i>Partnership for Global Infrastructure and Investment.</i>
RMB	: <i>Renminbi “mata uang rakyat” (dengan satuan yuan).</i>
WWF	: <i>World Wildlife Fund.</i>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana narasi *Chinese Exceptionalism* diperkuat dalam pelaksanaan *Belt and Road Initiative* (BRI) serta sejauh mana konsistensinya dengan realitas implementasi di negara-negara mitra. Masalah utama yang diangkat adalah adanya kesenjangan antara citra Tiongkok sebagai kekuatan besar yang damai, inklusif, dan reformis dengan praktik BRI yang kerap menunjukkan kontradiksi politik dan ekonomi. Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan konsep *Chinese Exceptionalism* dari Zhang yang mencakup tiga komponen utama: *Great Power Reformism*, *Benevolent Pacifism*, dan *Harmonious Inclusionism*. Argumen sementara penelitian ini adalah bahwa BRI berfungsi sebagai instrumen diplomasi normatif untuk memperkuat citra global Tiongkok, namun tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip moral dan inklusif yang diklaimnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga komponen tersebut hanya diperkuat secara parsial, dengan dominasi kepentingan ekonomi dan geopolitik yang sering kali menimbulkan ketergantungan serta ketimpangan di negara mitra. Dengan demikian, *Chinese Exceptionalism* dalam konteks BRI lebih berperan sebagai retorika politik daripada prinsip yang konsisten diimplementasikan dalam praktik kerja sama internasional.

Kata-kata kunci: *Belt and Road Initiative*, *Chinese Exceptionalism*, Identitas Nasional, Tiongkok.

ABSTRACT

This research examines how the narrative of Chinese Exceptionalism is strengthened through the implementation of the Belt and Road Initiative (BRI) and to what extent it remains consistent with the realities observed in partner countries. The main problem addressed in this study is the gap between China's self-proclaimed image as a peaceful, inclusive, and reformist power and the political and economic contradictions that often emerge in the actual practice of the BRI. The analytical framework employs Zhang's concept of Chinese Exceptionalism, which consists of three core components: Great Power Reformism, Benevolent Pacifism, and Harmonious Inclusionism. The study argues that the BRI primarily functions as a form of normative diplomacy designed to enhance China's global image, rather than a genuine reflection of its moral and inclusive principles. The findings indicate that these three components are only partially strengthened in practice, as economic and geopolitical interests continue to dominate and create structural dependencies among partner states. Consequently, within the BRI framework, Chinese Exceptionalism operates more as a rhetorical and strategic instrument than as a consistently applied normative principle in China's international engagement.

Keywords: *Belt and Road Initiative*, *China*, *Chinese Exceptionalism*, *National Identity*.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Identitas nasional merupakan cerminan dari cara pandang kolektif masyarakat tentang posisi mereka di dunia, dan hal ini terwujud dalam tujuan, prioritas, serta gaya interaksi negara dengan lingkungan internasionalnya. Salah satu pembahasan tentang identitas nasional adalah konsep *exceptionalism*, konsep ini telah lama menjadi tema yang menarik dalam studi Hubungan Internasional. Konsep ini mengacu pada pandangan bahwa suatu negara memiliki sifat, identitas, dan perilaku yang unik dan berbeda dari negara-negara lain (Wendt 2003, 67). Contoh dari konsep ini adalah *American Exceptionalism* yang lebih dulu populer dan *Chinese exceptionalism* yang dalam beberapa dekade ke belakang menjadi topik yang hangat antara akademisi studi hubungan internasional (Chase 2002, 287).

Chinese exceptionalism mengacu pada keyakinan Tiongkok bahwa negaranya memiliki sejarah, budaya, dan sistem politik yang unik, yang membuatnya berbeda dari Barat dan negara-negara lain (“Chinese Exceptionalism: An Interpretive Framework to Understanding China’s Rise and Relations with the World,” n.d., 176). Konsep ini telah menjadi pondasi penting dalam kebijakan luar negeri Tiongkok, yang sering dianggap sebagai tantangan terhadap tatanan internasional yang didominasi oleh Barat. Pandangan *Chinese exceptionalism* berakar pada pengalaman historis Tiongkok sebagai pusat peradaban di Asia Timur selama berabad-abad. Akar sejarah *Chinese Exceptionalism* dapat ditelusuri sejak zaman Dinasti Zhou (1046-256 SM) (Fairbank and Goldman 2006, 87). Pada masa

itu (sekitar tahun 551-479 SM), kepercayaan Konfusianisme muncul dan berkembang di Tiongkok. Dengan ajaran di dalamnya, Tiongkok mulai memandang dirinya sebagai "Negeri Tengah" (*Middle Kingdom*) yang menjadi pusat peradaban dunia, Tiongkok merasa menjadi sosok yang dapat dijadikan contoh oleh negara-negara lain karena dianggap lebih unggul secara budaya, ekonomi, dan politik. Selain itu, doktrin '*Tianming*' (*Mandate of Heaven*) dan '*Tributary system*' (sistem upeti ala Tiongkok) menjadi dasar bagi Tiongkok untuk memposisikan dirinya sebagai pusat dunia yang memiliki otoritas moral dan politik untuk mengatur tatanan global (Bell 2015, 48).

Pada abad ke-19 dan abad ke-20, Tiongkok mengalami kemunduran dan penjajahan oleh kekuatan Barat. Meskipun menghadapi tekanan dan intervensi dari negara-negara Barat, Tiongkok berusaha untuk mempertahankan identitas dan karakteristik uniknya dalam percaturan politik internasional (Callahan 2007, 129). Setelah Partai Komunis Tiongkok berkuasa pada tahun 1949, meskipun tidak secara eksplisit menerapkan konsep *Chinese exceptionalism* tapi nilai-nilai yang terkandung didalamnya kembali dihidupkan sebagai alat untuk membangun identitas nasional dan legitimasi rezim. Tiongkok menekankan bahwa negaranya memiliki sistem politik, ekonomi, dan sosial yang unik, yang tidak dapat diukur dengan standar Barat. Hal ini tercermin dalam konsep "*socialism with Chinese characteristics*" yang diterapkan dalam pembangunan ekonomi dan politik Tiongkok (Cai 2019, 49). Konsep *Chinese Exceptionalism* kemudian mulai populer seiring dengan munculnya dorongan kuat dari kalangan akademisi Tiongkok untuk mengembangkan *Chinese School* atau suatu pendekatan hubungan internasional yang berakar pada sejarah, budaya dan pengalaman politik Tiongkok sendiri. Pada

dekade awal tahun 2000 para akademisi Tiongkok seperti Qin Yaqing, Zhao Tingyang dan Yan Xuetong mulai memperkenalkan beberapa teori hubungan internasional berbasis pada perspektif Tiongkok (Yaqin and Zhirui 2016, 73; Yan et al. 2011, 31; Zhao and Westad 2021, 54).

Sejak terpilihnya Xi Jinping sebagai Presiden Tiongkok pada tahun 2013, Tiongkok telah mengalami transformasi strategis dan ideologis yang mendalam dalam cara ia memposisikan dirinya di panggung global. Jika pada era Jiang Zemin dan Hu Jintao kebijakan luar negeri Tiongkok lebih bersifat defensif, berhati-hati, dan berorientasi pada stabilitas, maka pada era Xi, orientasi tersebut berubah menjadi restoratif, proaktif, dan ambisius. Seperti dijelaskan oleh Chong (Chong 2014, 9–10), kebijakan luar negeri Tiongkok pasca-2013 mencerminkan keinginan untuk mengembalikan posisi historisnya sebagai *da guo* (negara besar) dengan peran normatif di dunia.

Transformasi ini tidak hanya dapat dilihat sebagai reaksi terhadap dinamika eksternal seperti perubahan geopolitik dan peluang ekonomi global, tetapi juga merupakan ekspresi dari internalisasi identitas baru dalam diri negara Tiongkok itu sendiri. Kebijakan luar negeri Tiongkok di bawah Xi mengalami pergeseran signifikan dari sifat defensif-responsif menuju asertif-proaktif, yang ditandai dengan upaya aktif untuk membentuk ulang arsitektur dan nilai-nilai sistem internasional agar lebih mencerminkan pandangan dunia dan kepentingan Tiongkok. Dengan demikian, Tiongkok di bawah Xi Jinping memproyeksikan kebangkitannya tidak hanya sebagai peningkatan kapabilitas material, tetapi sebagai kebangkitan peradaban, yang secara ideologis terbingkai dalam narasi besar *Chinese Dream (Zhongguo Meng)* (Yan 2019, 128).

Visi *Chinese Dream* yang diperkenalkan Xi Jinping sejak awal kepemimpinannya menjadi pilar ideologis utama dari perubahan ini. Seperti dijelaskan oleh Berlie (Berlie 2020, 89), Xi Jinping berhasil mengintegrasikan dimensi internal dan eksternal pembangunan Tiongkok ke dalam strategi komprehensif yang bersifat global dengan menggabungkan pembangunan nasional dengan keterlibatan aktif dalam tata kelola global. Konsep tersebut memadukan dua tujuan besar: (1) kemakmuran domestik melalui modernisasi sosialis dan reformasi ekonomi yang berkelanjutan, serta (2) kebangkitan global melalui proyeksi pengaruh Tiongkok di arena internasional. Dalam konteks ini, proyek BRI menjadi instrumen strategis utama untuk mengartikulasikan dan mewujudkan visi tersebut. Melalui BRI, Tiongkok menampilkan diri bukan hanya sebagai aktor ekonomi global, tetapi juga sebagai pencipta norma internasional baru dengan menekankan prinsip-prinsip non-intervensi, pembangunan bersama, dan *win-win cooperation* sebagai alternatif terhadap tatanan liberal yang didominasi Barat (Abdollahpour 2024, 49–50).

Dalam konteks penelitian ini, BRI dipilih karena tidak hanya berfungsi sebagai proyek ekonomi lintas benua, tetapi juga sebagai platform ideologis dan normatif di mana Tiongkok mengekspresikan keunggulannya dalam praktik kebijakan luar negeri. Melalui BRI, Tiongkok berusaha untuk menerjemahkan nilai-nilai tradisional seperti harmoni (*he*), pasifisme, dan kepemimpinan non-hegemonik ke dalam bentuk kerja sama pembangunan infrastruktur, pembiayaan tanpa syarat politik, serta diplomasi *people-to-people connectivity*. Proyek ini memperlihatkan bagaimana Tiongkok menggunakan pembangunan ekonomi sebagai sarana simbolik untuk menegaskan posisi globalnya sebagai kekuatan yang

“berbeda dari Barat” atau kekuatan yang menawarkan universalisme harmonis yang plural, bukan universalisme liberal yang eksklusif (Shan et al. 2018, 67–68).

Perubahan perilaku ini menandai adanya konsolidasi identitas eksepsional Tiongkok sebagai peradaban besar yang bangkit kembali, yang tidak lagi merasa perlu menyembunyikan kekuatannya, tetapi sebaliknya mulai tampil sebagai aktor normatif yang percaya diri. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri Tiongkok tidak hanya didorong oleh logika kepentingan material seperti perdagangan atau akses sumber daya, tetapi juga oleh keyakinan ideologis dan filosofis bahwa Tiongkok memiliki peran historis untuk menawarkan alternatif dari tatanan global yang lebih stabil, lebih harmonis, dan lebih adil dibandingkan sistem liberal Barat yang dianggap sarat intervensi dan hegemonik (Yaqin and Zhirui 2016, 97).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran bri dalam memperkuat narasi *chinese exceptionalism* pada Tiongkok kontemporer (2013-2023)?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis relevansi 3 aspek *Chinese exceptionalism* yaitu *great power reformism*, *benevolent pacifism* dan *harmonious inclusionism* pada Tiongkok kontemporer di era pemerintahan Xi Jinping sebagai konstruksi identitas nasional.

2. Menganalisis bagaimana *Belt and Road Initiative* berperan dalam memperkuat dan memperlemah narasi *Chinese Exceptionalism* pada Tiongkok kontemporer dan sejauh mana kesenjangan yang terdapat antara retorika yang disampaikan Tiongkok dan realitas pada negara mitra BRI selama kurun waktu 2013-2022.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini mengadopsi kerangka *Chinese Exceptionalism* Feng Zhang (2011) karena ketiga dimensinya *great power reformism*, *benevolent pacifism*, dan *harmonious inclusionism* mencerminkan narasi identitas Tiongkok pasca-kebangkitan yang relevan untuk menganalisis BRI (Zhang 2013, 315). Fokus temporal 2013–2023 dipilih karena mencakup siklus lengkap BRI: dari peluncuran (2013) hingga evaluasi kritis pasca-pandemi (2023), termasuk peristiwa krusial seperti keluarnya Italia dari BRI. Periodisasi Hwang (2021) yang membagi BRI menjadi tiga fase konektivitas regional atau fase inisiasi dengan tujuan utama sebagai wadah kerjasama regional (2013–2015), ekspansi intensif atau fase perluasan cakupan investasi proyek dan perubahan menjadi mega proyek transkontinental (2016–2019), dan penyempurnaan tata kelola atau fase evaluasi pasca Covid-19 (2020–2023), periode ini digunakan untuk menangkap evolusi dan dinamika implementasi (Hwang 2021, 2). Data penelitian akan mencakup narasi resmi Tiongkok dengan realitas implementasi pada negara mitra di setiap dimensi dan fase guna mengukur sejauh mana retorika *exceptionalism* diperkuat melalui BRI

1.5 Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian telah mendiskusikan terkait konsep *Chinese exceptional*, Penelitian pertama pada Buku berjudul "*Chinese Antitrust Exceptionalism: How the Rise of China Challenges Global Regulation*" yang ditulis oleh Angela Huyue Zhang dan diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 2021. Buku ini membahas tentang bagaimana Tiongkok sebagai sebuah kekuatan ekonomi baru telah menghadirkan tantangan tersendiri bagi tatanan regulasi antitrust global yang telah lama didominasi oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Masalah yang diangkat dalam buku ini adalah bagaimana Tiongkok sebagai regulator antitrust yang relatif baru telah menerapkan pendekatan yang berbeda dari standar internasional yang ada. Di sisi lain, Tiongkok juga menjadi target regulasi antitrust dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, khususnya terkait dengan ekspansi agresif perusahaan-perusahaan Tiongkok yang sebagian besar merupakan perusahaan milik negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat friksi yang tak terhindarkan antara Tiongkok dan tatanan regulasi antitrust global yang selama ini didominasi oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Perbedaan mendasar dalam pendekatan, institusi, dan kepentingan ekonomi-politik menyebabkan Tiongkok cenderung menyimpang dari standar internasional yang ada. Meskipun komprehensif dalam menganalisis isu-isu antitrust Tiongkok, penelitian ini Hanya menganalisis isu-isu antitrust Tiongkok yang dinarasikan oleh Amerika Serikat dan negara Uni Eropa melalui kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Tiongkok (Zhang 2021, 198–201).

Selanjutnya, Buku "*The Rise of China and International Law: Taking Chinese Exceptionalism Seriously*" oleh Congyan Cai pada tahun 2021 membahas

dua sisi utama, yaitu peran Tiongkok dalam perkembangan hukum internasional dan peran hukum internasional dalam perkembangan Tiongkok. Penulis mengeksplorasi bagaimana hukum internasional saat ini memengaruhi cara Tiongkok bertindak, bagaimana Tiongkok berada dalam komunitas internasional, dan bagaimana Tiongkok dapat membentuk hukum internasional. Penulis menganalisis empat rezim (Perdamaian dan Keamanan; WTO dan Hukum Investasi; Hak Asasi Manusia; dan Keamanan Siber). Selain itu, penulis juga membahas pendekatan Tiongkok terhadap penyelesaian sengketa internasional formal. Secara keseluruhan, buku ini menawarkan analisis komprehensif tentang hubungan antara Tiongkok dan hukum internasional. Penelitian ini Lebih banyak mengeksplorasi hukum dan rezim internasional dalam mempengaruhi cara Tiongkok bertindak. Keutamaan *Chinese exceptionalism* hanya dibahas pada bagian peran Tiongkok dalam institusi internasional (Cai 2019, 83–86).

Selanjutnya, “*China’s Political Worldview and Chinese Exceptionalism: International Order and Global Leadership*” oleh Benjamin Tze Ern Ho yang diterbitkan pada tahun 2021 (Ho, 2021). Buku ini memperkenalkan konsep *Chinese Exceptionalism* sebagai kerangka untuk mempelajari pandangan politik Tiongkok dan hubungan internasionalnya. Argumen utama buku ini adalah bahwa wacana keunggulan Tiongkok telah menyebar luas di kalangan akademisi Tiongkok sebagai modus penyelidikan politik untuk memahami hubungan internasional Tiongkok dan visi mereka tentang tatanan global. Buku ini menunjukkan bahwa keunggulan Tiongkok sangat mempengaruhi cara Tiongkok memandang dirinya sendiri dan dunia luar. Namun, buku ini juga mengakui adanya keterbatasan keunggulan Tiongkok dalam menjelaskan perilaku politik-Nya yang terkadang

tidak konsisten dengan klaim keistimewaannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor lain yang membentuk pandangan politik Tiongkok dan bagaimana itu diterjemahkan ke dalam tindakan kebijakan luar negeri (Ho 2021, 111–15).

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis bagaimana narasi *Chinese exceptionalism* diperkuat melalui *Belt and Road Initiative*, penulis akan mengadopsi manifestasi *Chinese exceptionalism* dari Feng Zhang yang dianggap relevan untuk menjadi variabel indikator penelitian. Dalam artikelnya, Zhang mendefinisikan *Chinese Exceptionalism* sebagai suatu konstruksi identitas nasional yang memandang Tiongkok sebagai entitas unik dalam sistem internasional, dengan sejarah, budaya, dan jalur pembangunan yang berbeda dari kekuatan besar lain khususnya Barat. Zhang memaparkan perspektif historis dari *Chinese Exceptionalism* yang telah dibangun Tiongkok dalam 3 periode berbeda yang memiliki ciri khas masing-masing yang tercermin dari retorika yang dibangun Tiongkok pada setiap agenda luar negeri yang dilakukan Tiongkok (Zhang 2013, 10).

Tabel 1. Perspektif Historis dari *Chinese Exceptionalism*

Periode Kerajaan dan Dinasti	Periode Revolusi Tiongkok (RRT)	Periode Kontemporer atau Tiongkok Modern
<i>Imperial Sinocentrism</i>	<i>Revolutionary Sinocentrism</i>	<i>Great Power Reformism</i>
<i>Benevolent Pacifism</i>	<i>Great Power Entitlement</i>	<i>Benevolent Pacifism</i>
<i>Magnanimous Inclusionism</i>	<i>Moralism</i>	<i>Harmonious Inclusionism</i>

Sumber: (Zhang 2013, 320)

Penelitian ini akan berfokus pada periode Tiongkok kontemporer, Zhang mengidentifikasi tiga komponen utama yang membentuk fenomena *emerging*

exceptionalism Tiongkok kontemporer melalui retorika kebangkitan damai yang dibangun Tiongkok pada periode kepemimpinan Jiang Zemin (1993-2003) dan Hu Jintao (2003-2013), yaitu *great power reformism*, *benevolent pacifism*, dan *harmonious inclusionism*. Meskipun dalam jurnalnya, Zhang tidak menjelaskan secara eksplisit terkait batasan temporal dari konteks kontemporer yang digunakannya. Namun demikian, Zhang menjelaskan bahwa kerangka *chinese exceptionalism* dapat terus berkembang dan berlanjut, bahkan ada kemungkinan terdapat beberapa komponen yang sama periode-periode sebelumnya (Zhang 2013, 312). Ketiga komponen ini tidak diposisikan sebagai tahapan linier, melainkan sebagai elemen yang saling melengkapi dalam membentuk citra dan orientasi arah kebijakan atau agenda internasional Tiongkok (Zhang 2013, 321). yang mana ketiga aspek tersebut antara lain:

1. ***Great Power Reformism*** adalah keyakinan bahwa Tiongkok, sebagai kekuatan besar yang sedang bangkit, memiliki misi untuk mereformasi tatanan internasional agar menjadi lebih adil, seimbang, dan inklusif. Berbeda dengan pendekatan hegemonik tradisional, *great power reformism* menekankan perubahan melalui partisipasi aktif dalam lembaga internasional, penguatan norma-norma baru, serta penyusunan arsitektur global yang lebih sesuai dengan kepentingan negara berkembang. Zhang memberikan 3 indikator atau karakteristik dari narasi ini yaitu Reformasi tatanan global, pembangunan yang berdampak nyata, dan diplomasi non-hegemonik (Zhang 2013, 312).
2. ***Benevolent Pacifism*** menggambarkan citra Tiongkok sebagai kekuatan damai yang menolak ekspansi militer agresif dan lebih mengutamakan

pembangunan ekonomi serta hubungan diplomatik harmonis. Zhang menelusuri akar historis *benevolent pacifism* pada pandangan bahwa Tiongkok memiliki tradisi peradaban yang mengutamakan stabilitas dan kesejahteraan bersama daripada konfrontasi. Dalam konteks kontemporer, Narasi ini memiliki 3 indikator atau karakteristik yaitu Menjaga perdamaian melalui pembangunan, diplomasi ekonomi dan budaya sebagai alat soft power yang memiliki dampak kemanusiaan, serta resolusi konflik melalui negosiasi (Zhang 2013, 312)

3. ***Harmonious Inclusionism*** adalah prinsip yang mengedepankan keterbukaan dan penerimaan terhadap keragaman budaya, politik, dan ekonomi di antara negara-negara di dunia. Zhang menempatkan *harmonious inclusionism* sebagai kelanjutan dari filsafat “*harmony with difference*” dalam tradisi Tiongkok, di mana kerja sama internasional dibangun atas dasar saling menghormati perbedaan dan menghindari dominasi ideologis. Dalam praktiknya, aspek ini mendorong Tiongkok untuk tidak memaksakan sistem politik atau nilai tertentu, memaksimalkan kerjasama dan meminimalisir konflik, multilateralisme dan kerjasama yang saling menguntungkan (Zhang 2013, 313)

Ketiga komponen ini bersama-sama membentuk narasi *Chinese Exceptionalism* yang menempatkan Tiongkok sebagai kekuatan besar dengan karakter berbeda: reformis namun bukan revolusioner, damai namun berpengaruh, dan inklusif namun berprinsip. Kerangka ini menyediakan lensa analitis untuk memahami bagaimana Tiongkok membangun dan memproyeksikan identitasnya di

sistem internasional, serta bagaimana narasi tersebut mempengaruhi dinamika hubungan luar negeri dan persepsi global terhadap Tiongkok.

1.7 Argumen Sementara

BRI yang merupakan agenda internasional Tiongkok diproyeksikan sebagai wujud nyata *Chinese Exceptionalism*, menekankan *great power reformism*, *benevolent pacifism*, dan *harmonious inclusionism*. Secara resmi, BRI diklaim mereformasi tatanan global tanpa menggantikan sistem yang ada, memajukan pembangunan damai, dan mendorong kerja sama inklusif. Namun, realitas di negara mitra seperti Sri Lanka, Kenya, Pakistan, dan negara-negara lain menunjukkan kesenjangan seperti isu *debt-trap*, dominasi kontraktor, gesekan sosial-politik, dan ketimpangan manfaat memunculkan persepsi negatif terhadap agenda internasional Tiongkok ini. Meski efektif di ranah diplomasi publik, penguatan narasi ini dinilai hanya bersifat parsial, kontekstual, dan sangat dipengaruhi kondisi domestik negara mitra serta hubungan politik dengan Tiongkok. Implementasi di lapangan kerap mengaburkan citra reformis, damai, dan inklusif yang ingin dibangun Tiongkok.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif-deskriptif, metode ini didefinisikan sebagai metode yang mengelaborasi data-data lebih jauh terhadap sebuah fenomena. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan triangulasi, pendekatan ini didefinisikan sebagai pendekatan yang menggabungkan berbagai data, metode, sumber, dan/atau teori untuk memeriksa keabsahan dan

meningkatkan validitas serta reliabilitas hasil penelitian (Wiyanda Vera Nurfajriani 2024, 828).

1.8.2 *Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek penelitian adalah pelaksanaan *Belt and Road Initiative* pada masa kepemimpinan Xi Jinping. Sedangkan objek penelitian adalah konsep *Chinese Exceptionalism*, bagaimana peran BRI dalam memperkuat narasi *Chinese exceptionalism*.

1.8.3 *Metode Pengumpulan Data*

Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk memperkuat argumen dari konsep *Chinese exceptionalism* dengan mengambil indikator dari *Chinese exceptionalism* Tiongkok kontemporer yang dikemukakan oleh Feng Zhang. Studi literatur diimplementasikan melalui Analisa dari buku, jurnal, laman berita, serta laman resmi pemerintah Tiongkok.

1.8.4 *Proses Penelitian*

Proses penelitian akan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data. Data terkait retorika yang dibangun Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) akan dianalisis melalui indikator milik Feng Zhang, yang selanjutnya akan dianalisis kembali dengan mengkomparasikan antara retorika yang dibangun Tiongkok dan realitas pada negara mitra BRI.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Pengantar awal memuat latar belakang, pertanyaan penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan penelitian, tinjauan Pustaka dan kerangka pemikiran.

BAB II: NARASI KONSEPTUAL *BELT AND ROAD INITIATIVE* DAN REALITAS IMPLEMENTASI PADA NEGARA MITRA

Bab ini menyajikan data dari narasi resmi Tiongkok terkait *Chinese Exceptionalism* sebagaimana direpresentasikan melalui kebijakan BRI, dilengkapi dengan data yang merefleksikan implementasinya di negara-negara mitra. Penyusunan bab ini dibagi ke dalam tiga sub-bab sesuai komponen utama *Chinese Exceptionalism* yang diidentifikasi Feng Zhang yaitu; upaya Tiongkok memperoleh status kekuatan besar melalui BRI, upaya Tiongkok menciptakan perdamaian global dan upaya Tiongkok mewujudkan keterlibatan inklusif berbagai pihak.

BAB III: ANALISIS MANIFESTASI CHINESE EXCEPTIONALISM PADA *BELT AND ROAD INITIATIVE*

Bab ini akan menganalisis temuan pada Bab II dengan kerangka teoretis Feng Zhang mengenai tiga komponen *Chinese Exceptionalism*. Analisis dilakukan untuk mengkaji hubungan antara retorika resmi, praktik implementasi BRI, dan realitas implementasi di negara mitra, serta mengidentifikasi kesenjangan di antara ketiganya.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penulis terhadap diskusi pada bab 1 hingga 3 sebagai intisari dari penelitian yang dilaporkan oleh penulis.

BAB 2

NARASI TIONGKOK ATAS *BELT AND ROAD INITIATIVE* DAN REALITAS IMPLEMENTASI PADA NEGARA MITRA

2.1. Upaya Tiongkok Memperoleh Status Kekuatan Besar

Belt and Road Initiative (BRI) yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013 dapat dilihat sebagai manifestasi nyata dari ambisi strategis Tiongkok untuk mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan besar (*great power*) yang mampu menantang dan menggeser dominasi kekuatan global yang telah mapan. Melalui inisiatif ini, Tiongkok tidak hanya memproyeksikan kapasitas ekonominya melalui pembangunan infrastruktur lintas kawasan senilai lebih dari \$1 triliun, tetapi juga secara sistematis membangun jaringan pengaruh geopolitik yang mengubah struktur kekuasaan internasional (Abdollahpour 2024, 54).

Pada periode 2013–2015, Tiongkok secara sistematis membangun fondasi strategis untuk mengukuhkan statusnya sebagai kekuatan besar global melalui dua pendekatan utama yaitu proyeksi kapasitas ekonomi sebagai alat *soft-power* dan penciptaan alternatif tatanan kelembagaan yang menantang dominasi Barat (Chong 2014, 948–50). Pada tahap awal ini, Tiongkok memfokuskan BRI pada pembangunan infrastruktur konektivitas regional yang secara simbolis dan praktis menunjukkan kemampuannya sebagai donor pembangunan terbesar di dunia. Xi Jinping, dalam pidatonya di Universitas Nazarbayev (Kazakhstan, September 2013), meluncurkan konsep *Silk Road Economic Belt* dengan menegaskan (Ministry of Foreign Affairs 2013), "*China is ready to work with countries in the region to build a modern infrastructure network connecting Asia and Europe, creating an open and inclusive space for common development*".

Pernyataan ini diikuti dengan peluncuran *21st Century Maritime Silk Road* di Indonesia (Oktober 2013), yang menargetkan pembangunan pelabuhan strategis di Asia Tenggara dan Samudra Hindia. Secara kuantitatif, Tiongkok mengalokasikan \$40 miliar untuk proyek percontohan di fase ini seperti Kereta Api Ethiopia-Djibouti (\$3,4 miliar), Jalan Raya China-Pakistan (\$46 miliar), dan Pelabuhan Gwadar (\$1,62 miliar) (Wang 2022, 16–20).

Salah satu upaya paling signifikan dalam konteks ini adalah penerapan perjanjian pertukaran mata uang bilateral (*currency swap agreements*), yang berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendukung internasionalisasi RMB sekaligus memperkuat peran Tiongkok dalam tatanan keuangan dunia. Melalui *currency swap*, Tiongkok memberikan akses likuiditas langsung kepada negara mitra untuk melakukan transaksi perdagangan dan pembiayaan proyek menggunakan RMB, tanpa melalui dolar Amerika Serikat sebagai perantara (People's Bank of China, Annual Report on RMB Internationalization, 2023, 97). Kebijakan ini merupakan bagian integral dari upaya Tiongkok dalam membangun tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan inklusif, sejalan dengan visi Xi Jinping tentang *community of shared future for mankind*, yang juga menjadi landasan ideologis BRI (State Council Information Office of the PRC, White Paper on the Belt and Road Initiative, 2023, 12).

Dalam praktiknya, PBoC telah menandatangani lebih dari 40 perjanjian swap mata uang bilateral dengan berbagai negara sejak 2013, dengan total nilai melebihi 4 triliun yuan (setara lebih dari 550 miliar dolar AS). Negara mitra yang terlibat meliputi Indonesia, Pakistan, Malaysia, Argentina, Brasil, dan Afrika Selatan, serta sejumlah ekonomi maju seperti Korea Selatan dan Uni Eropa

(Subacchi, 2017; IMF, 2021). Misalnya, Indonesia dan Tiongkok memperbarui perjanjian *swap line* senilai RMB 350 miliar pada tahun 2020 untuk mendukung stabilitas perdagangan dan pembiayaan proyek-proyek BRI (Bank Indonesia, 2020, 37). Pakistan juga memanfaatkan fasilitas serupa dalam mendukung proyek CPEC, sedangkan Argentina pada 2023 mulai menggunakan RMB untuk pembayaran impor strategis dari Tiongkok (People's Bank of China, 2023). Melalui mekanisme ini, Tiongkok secara efektif menyediakan alternatif likuiditas non-dolar bagi negara mitra, memperkuat ketahanan finansial regional, dan memperluas penggunaan RMB sebagai mata uang internasional.

Selin itu, strategi krusial Tiongkok pada fase ini adalah membangun arsitektur kelembagaan alternatif yang secara langsung menantang monopoli Bank Dunia dan IMF. Pada Oktober 2014, Tiongkok mengumumkan pendirian AIIB dengan modal awal \$50 miliar, yang kemudian meningkat menjadi \$100 miliar pada Juni 2015 (Nedopil 2024, 19–25). Dalam dokumen *MoU on Establishing the AIIB* (2014), ditegaskan bahwa (MoU AIIB, 2014), “*providing financial support for infrastructure projects in Asia based on the principles of openness, inclusiveness, and independence*”. Narasi resmi secara eksplisit memosisikan AIIB sebagai reformis tatanan keuangan global yang selama ini dianggap diskriminatif terhadap negara berkembang. Upaya ini berhasil menarik 57 negara anggota pendiri, termasuk sekutu strategis AS seperti Inggris, Jerman, dan Prancis yang menunjukkan bahwa narasi ‘reformis’ Tiongkok memiliki daya tarik global. Selain AIIB, Tiongkok mendirikan *Silk Road Fund* (\$40 miliar) pada Desember 2014 untuk membiayai proyek-proyek spesifik BRI di luar mekanisme AIIB,

menunjukkan fleksibilitas instrumen keuangan yang dimiliki (White Paper BRI, 2015).

Pada fase ekspansi intensif periode 2016–2019, Tiongkok secara intensif memperluas jangkauan BRI dari proyek regional menjadi inisiatif global yang mencakup 149 negara dengan total investasi mencapai \$940 miliar. Strategi ini didesain untuk mentransformasikan BRI dari kerangka kerja pembangunan menjadi arsitektur tatanan internasional alternatif yang secara langsung menantang dominasi kekuatan Barat. Upaya Tiongkok pada fase ini ditandai oleh tiga pilar utama: ekspansi geografis skala besar, penguatan lembaga keuangan alternatif, dan pemingkanaan narasi "komunitas masa depan bersama" yang secara sistematis menggambarkan Tiongkok sebagai pemimpin global yang progresif dan inklusif. Narasi resmi, yang disampaikan melalui pidato Xi Jinping, dokumen kebijakan, dan forum internasional, secara konsisten menekankan prinsip "keterbukaan, inklusivitas, dan saling menguntungkan" (Liu and Dunford 2016, 331–34).

Fase ini ditandai oleh penyelesaian proyek di Asia dan percepatan implementasi proyek infrastruktur di luar kawasan Asia, dengan fokus pada koridor ekonomi strategis yang menghubungkan Tiongkok dengan Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Xi Jinping dalam Forum Belt and Road pertama (Mei 2017) secara resmi menyatakan (China News Network 2017), *"The Belt and Road Initiative has grown from concept to reality, with more than 1,000 projects in 68 countries. We will expand cooperation worldwide to build a global connectivity network"*.

Proyek-proyek unggulan pada fase ini mencakup CPEC senilai \$62 miliar (termasuk jalan tol, pembangkit listrik, dan pelabuhan Gwadar), Jalur Kereta Api Tiongkok-Eropa yang menghubungkan 48 kota di Eropa dengan 15.000 jalur

perjalanan tahunan, serta Pelabuhan Piraeus di Yunani yang diakuisisi oleh COSCO senilai €368 juta (Wang 2022, 14–21). Secara khusus, Tiongkok memfokuskan investasi pada sektor energi dan transportasi untuk menciptakan ketergantungan struktural: 60% proyek energi BRI berupa pembangkit listrik tenaga batu bara, sementara 70% proyek pelabuhan berlokasi di negara dengan risiko geopolitik tinggi seperti Sri Lanka, Myanmar, dan Djibouti (CSIS, 2018, 21). Narasi resmi secara intensif menyoroti aspek "konektivitas fisik dan digital" ini sebagai bukti kemampuan Tiongkok menyediakan "solusi pembangunan konkret" bagi negara berkembang yang diabaikan oleh Barat (Mercator Institute for China Studies 2018).

Meskipun Tiongkok membingkai BRI sebagai inisiatif "*win-win cooperation*", realitas implementasi di negara mitra justru mengungkap pola ketergantungan struktural, ketimpangan kekuasaan, dan ketegangan geopolitik. Tiga fenomena dominan mewarnai fase ini seperti krisis utang atau *debt trap diplomacy*, dominasi ekonomi dan ketimpangan struktural, dan konflik sosial-politik lokal (Brautigam 2020, 7–9).

Narasi Tiongkok tentang "pembiayaan tanpa syarat" bertentangan dengan realitas beban utang tak bertanggung yang dialami negara mitra. Studi *Center for Global Development* (2018) mengidentifikasi 23 negara berisiko mengalami *debt distress* akibat pinjaman BRI, dengan utang kepada Tiongkok melebihi 20% PDB mereka. Kasus paling ikonik adalah Sri Lanka yang mana telah meminjam \$1,1 miliar dari *China EXIM* (2007–2014) untuk membangun pelabuhan yang kurang menguntungkan. Hingga pada 2017, negara ini gagal bayar utang dan terpaksa menyewakan pelabuhan kepada *China Merchants Port Holdings* selama 99 tahun dengan nilai \$1,12 miliar (Russel and Berger 2019, 23–31). Kondisi ini dianggap

sebagai kehilangan kedaulatan oleh masyarakat Sri Lanka. Selain Sri Lanka, Pakistan juga menjadi sorotan terkait krisis utang. Meski Pakistan menyebut CPEC sebagai '*game changer*', utangnya kepada Tiongkok melonjak dari \$7 miliar (2013) menjadi \$30 miliar (2019). *Pakistan Institute of Development Economics* (2019) memperingatkan bahwa 40% pendapatan devisa negara itu akan habis untuk membayar utang BRI pada 2025 (Clark 2023, 76–79).

Narasi "kemitraan setara" Tiongkok bertolak belakang dengan dominasi perusahaan Tiongkok dalam proyek BRI. Data American Enterprise Institute (2019) menunjukkan 78% kontraktor proyek BRI adalah perusahaan Tiongkok seperti CCCC dan CRC. Selain itu, 90% tenaga kerja ahli berasal dari Tiongkok, sementara pekerja lokal hanya mendapat posisi non-teknis dengan gaji di bawah standar (Minghao 2016, 111–13).

Di Kenya, pembangunan jalur kereta api Mombasa-Nairobi dengan nilai proyek sebesar \$3,6 miliar ini dibangun oleh CRBC dengan 90% material impor dari Tiongkok. Meski dijanjikan akan menciptakan 30.000 lapangan kerja, Kenya National Bureau of Statistics (2018) mencatat hanya 5.000 pekerjaan terbentuk, dan 70% di antaranya untuk staf administrasi Tiongkok. Lebih parah, utang proyek ini mencapai \$5,3 miliar (termasuk bunga), memaksa Kenya mengalokasikan 40% anggaran pembangunan 2020 untuk cicilan utang (Mccarthy 2011, 65–72).

Pada periode 2020–2023 menandai titik balik kritis bagi BRI, di mana Tiongkok berupaya mempertahankan legitimasi status kekuatan besarnya di tengah gelombang skeptisisme internasional, krisis utang global, dan perubahan geopolitik pasca-pandemi COVID-19. Strategi Tiongkok pada fase ini berfokus pada reposisi BRI sebagai inisiatif berkelanjutan dan inklusif melalui tiga pilar: *Green BRI*

(pembangunan ramah lingkungan), *Health Silk Road* (diplomasi kesehatan global), dan *Digital Silk Road* (dominasi teknologi). Narasi resmi, yang disampaikan melalui dokumen kebijakan, forum internasional, dan media global, secara intensif menekankan prinsip "*high-quality development*" (pembangunan berkualitas tinggi) dan "*sustainability*" (keberlanjutan) untuk menanggulangi kritik bahwa BRI merupakan alat *debt-trap diplomacy* dan neokolonialisme (Contributor 2023, 14–21). Xi Jinping dalam Forum *Belt and Road* ketiga (Oktober 2023) menyatakan (Ministry of Foreign Affairs 2023), "*Belt and Road Initiative has entered a new era: we focus on small projects with big impacts, transparency, and environmental protection. This is not expansion, but refinement*".

Peluncuran "Green BRI" pada 2021 sebagai upaya mengubah citra BRI dari proyek infrastruktur menjadi inisiatif berkelanjutan. Dokumen *Guidance on Promoting Green Belt and Road* (Maret 2022) menetapkan (Ministry of Ecology of China, 2022), "*All new BRI projects must meet the 2060 net-zero carbon emission standard and undergo independent environmental audits*". Secara bertahap, Tiongkok menghentikan pendanaan pembangkit batu bara di luar negeri (2021) dan mengalokasikan \$124 miliar untuk energi terbarukan (surya, angin, hidro) di 57 negara. Proyek unggulan termasuk PLTA *Upper Tamakoshi* di Nepal (\$500 juta) dan Taman Surya Benban di Mesir (\$2 miliar) (Zeng 2019, 209–12).

Selain itu, Tiongkok juga mempercepat ekspansi melalui *Digital Silk Road* dengan investasi \$79 miliar untuk infrastruktur digital di 60 negara (Miller 2023, 81–82). Fokusnya meliputi:

- Jaringan 5G: Huawei membangun infrastruktur 5G di 40 negara (termasuk Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Indonesia).

- *E-Government*: Sistem keamanan siber dan pengawasan (*Safe City*) di Pakistan, Serbia, dan Kenya.
- *E-Commerce*: Alibaba dan JD.com menguasai 70% pasar e-commerce di Asia Tenggara. Xi Jinping dalam *World Internet Conference (2022)* menyatakan (People's Daily, 2022), "*The Digital Silk Road is the highway of the future. China will set global technology standards*".

Meskipun narasi "penyempurnaan" digencarkan, realitas lapangan justru mengungkap krisis kepercayaan yang mendalam dan ketegangan geopolitik yang memuncak. Italia menjadi negara G7 pertama yang keluar dari BRI (Maret 2023) setelah evaluasi bahwa "manfaat ekonomi tidak sebanding dengan risiko geopolitik" (Berlie 2020, 88–91).

Pada November 2021, Zambia dinyatakan sebagai negara pertama di Afrika yang gagal bayar utang BRI (November 2021) dengan tunggakan \$6,3 miliar kepada Tiongkok. Meski Tiongkok setuju restrukturisasi utang melalui G20, negara ini terpaksa menyerahkan aset strategis seperti Zambia National Broadcasting Corporation dan Ndola Airport sebagai jaminan. Lebih dari itu, Utang Jalur Kereta Api Mombasa-Nairobi membengkak menjadi \$7,2 miliar (termasuk bunga), memaksa Kenya mengalokasikan 34% anggaran 2023 untuk cicilan (Zhu and Yang 2025, 1045–48).

Realitas ini mendorong Barat meluncurkan *counter-strategy* yang lebih agresif seperti PGII dimana G7 mengalokasikan \$600 miliar untuk menyaingi BRI dengan fokus transparansi dan keberlanjutan (2022). *Global Gateway* dimana Uni Eropa menginvestasikan €300 miliar untuk infrastruktur digital dan hijau di Afrika dan Asia (2021). *Blue Dot Network* dimana AS, Jepang, dan Australia

mensertifikasi proyek infrastruktur yang memenuhi standar internasional pada tahun 2023 (Ho 2021, 92–94).

2.2. Upaya Tiongkok Menciptakan Perdamaian Global

Pada fase inisiasi Belt and Road Initiative (BRI) periode 2013–2015, Tiongkok secara sistematis membangun narasi "perdamaian melalui pembangunan" (*peace through development*). Narasi ini dirancang untuk membingkai BRI sebagai instrumen diplomasi damai yang kontras dengan pendekatan keamanan Barat, dengan menekankan prinsip *non-interference* (tidak mencampuri urusan dalam negeri) dan *win-win cooperation* (kerja sama saling menguntungkan) (Dunford and Liu 2019, 151–54). Upaya Tiongkok pada fase ini didukung oleh tiga strategi terkoordinasi: proyek infrastruktur sebagai alat konektivitas perdamaian, diplomasi kultural untuk memperkuat citra non-agresif, dan inisiatif keamanan regional yang inklusif (Huang 2016, 317–19). Narasi resmi, yang disampaikan melalui pidato kenegaraan Xi Jinping, dokumen kebijakan, dan forum multilateral, secara konsisten menekankan bahwa stabilitas global hanya dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi inklusif, bukan melalui intervensi militer atau pemaksaan nilai asing (Ministry of Foreign Affairs 2023).

Tiongkok memposisikan BRI sebagai solusi alternatif terhadap ketidakstabilan global yang disebabkan oleh kemiskinan dan ketimpangan pembangunan. Dalam pidato peluncuran Silk Road Economic Belt di Kazakhstan (September 2013), Xi Jinping menyatakan (Ministry of Foreign Affairs 2013): "*To achieve lasting peace, we must first build a network of economic connectivity that connects the entire region. Development is the key to eliminating the roots of conflict*". Konsep ini dioperasionalkan melalui proyek-proyek "*practical peace*"

yang ditujukan untuk mengurangi ketegangan perbatasan dan memperkuat interdependensi ekonomi, seperti:

- Jalur Kereta Api China-Kazakhstan: Menghubungkan Xi'an (Tiongkok) dengan Almaty (Kazakhstan) senilai \$5 miliar, mengurangi ketegangan perdagangan di kawasan Asia Tengah yang rawan konflik etnis.
- Pelabuhan Gwadar (Pakistan): Dibangun dengan investasi \$1,62 miliar sebagai pintu gerbang perdagangan untuk Afghanistan dan Asia Tengah, dengan narasi "pelabuhan ini akan mengurangi perdagangan narkoba dan ekstremisme melalui peluang ekonomi" (CPEC Investment Report, 2015, 23).
- Jaringan Pipa Gas Tiongkok-Myanmar: Proyek senilai \$2,5 miliar untuk mengurangi ketergantungan Tiongkok pada Selat Malaka sekaligus menyediakan energi terjangkau ke Myanmar, dianggap sebagai alat "stabilitas melalui kesejahteraan" (Liu and Dunford 2016, 333–36).

Secara kuantitatif, Tiongkok mengalokasikan \$12 miliar untuk proyek-proyek yang secara eksplisit diklasifikasikan sebagai "*peace projects*" dalam fase ini, termasuk pembangunan 10 pelabuhan dan 5 jalur kereta api lintas batas di Asia Tenggara dan Asia Tengah (Wang 2022, 32–34). Untuk memperkuat narasi perdamaian, Tiongkok meluncurkan '*People-to-People Connectivity*' sebagai bagian integral BRI. Inisiatif ini difokuskan pada tiga sektor yaitu pendidikan, pariwisata dan pertukaran budaya melalui berbagai program seperti pemberian beasiswa, pendirian *Confucius Institute* di 15 negara mitra BRI (2013–2015) dengan dana \$300 juta untuk mempromosikan bahasa dan budaya Tiongkok, penyederhanaan visa untuk wisatawan dari 45 negara, dan pelaksanaan festival *Silk*

Road Week di 20 kota yang menampilkan seni tradisional Tiongkok (Minghao 2016, 110–13).

Strategi pada periode 2016-2019 diarahkan untuk membangun legitimasi global sebagai kekuatan besar yang konstruktif di tengah meningkatnya skeptisisme internasional terhadap ambisi geopolitik Tiongkok. Upaya pada fase ini ditandai oleh tiga pilar utama: skalabilitas proyek infrastruktur sebagai alat stabilitas regional, diplomasi kesehatan dan kemanusiaan untuk memperkuat citra kemanusiaan, serta mekanisme keamanan multilateral yang inklusif. Narasi resmi, yang disampaikan melalui pidato Xi Jinping, dokumen kebijakan, dan forum internasional, secara konsisten menekankan bahwa BRI adalah solusi bagi ketegangan global akibat ketimpangan pembangunan, dengan menolak keras anggapan bahwa inisiatif ini merupakan alat ekspansi militer atau hegemoni (Osman 2021, 14–17).

Tiongkok memperluas cakupan BRI dari proyek regional menjadi jaringan global yang menghubungkan Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Secara kuantitatif, investasi Tiongkok untuk proyek '*peace infrastructure*' mencapai \$210 miliar pada fase ini, termasuk 35 pelabuhan, 20 jalur kereta api lintas negara, dan 15 pembangkit listrik di negara konflik seperti Afghanistan, Irak, dan Sudan (American Enterprise Institute, 2019, 47-49).

Meskipun Tiongkok membingkai BRI sebagai instrumen perdamaian, realitas implementasi justru memicu ketidakstabilan baru di berbagai negara mitra. Konflik sosial dan protes lokal, dampak lingkungan dan kerusakan ekosistem, serta ketegangan geopolitik justru mewarnai periode ini sebagai inkonsisten antara narasi dan implementasi BRI.

Berbagai protes massal yang dipicu oleh ketimpangan ekonomi, perampasan tanah, dan dominasi tenaga kerja Tiongkok terjadi di berbagai negara mitra. Data ICIJ menunjukkan sebanyak 12 negara mengalami protes skala besar terkait BRI (2016–2019) dan 50.000+ demonstran turun ke jalan menentang proyek BRI di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Pada kasus CPEC yang meskipun dinarasikan sebagai game changer, justru memicu ketegangan di Balochistan dan Gilgit-Baltistan. Pada tahun 2017, sebanyak kurang lebih 10.000 warga menuntut pembagian lapangan kerja dan hak atas sumber daya lokal di Gwadar. Protes ini terjadi karena 80% pekerja teknis di proyek CPEC adalah warga Tiongkok, sementara warga lokal hanya mendapat pekerjaan *non-skilled* dengan gaji di bawah standar (Yan and Fang 2024, 75–78). Sama halnya pada kasus jalur kereta api Mombasa-Nairobi di Kenya yang disebabkan sebanyak 5.000 keluarga digusur tanpa kompensasi memadai untuk pembangunan rel (The Guardian, 2018, 87).

Dampak lingkungan dan kerusakan ekosistem juga menjadi salah satu isu yang sering diangkat pada periode ini, narasi ‘pembangunan berkelanjutan’ bertolak belakang dengan realitas pada negara mitra. WWF mengidentifikasi 35 proyek BRI yang mengancam keanekaragaman hayati, tercatat sebanyak 60% proyek energi BRI menggunakan batu bara (bukan energi terbarukan seperti yang dijanjikan) dan 70% proyek infrastruktur mengabaikan AMDAL (Geng 2024, 97–101). Pada kasus proyek Myitsone Dam di Myanmar diperkirakan akan membanjiri 66 desa dan menghancurkan ekosistem Sungai Irrawaddy, CPIC juga memaksa pemerintah Myanmar melanjutkan proyek yang diberhentikan sementara pada 2011 dengan ancaman sanksi ekonomi.

Lebih dari itu, isu ketegangan geopolitik juga mewarnai periode ini, narasi 'pembangunan tanpa ekspansi militer' bertentangan dengan penggunaan BRI untuk kepentingan strategis. negara mitra yang telah kehilangan kontrol atas pelabuhan proyek BRI seperti Sri Lanka, Pakistan dan Djibouti secara aktif dijadikan pangkalan militer dengan kapal selam militer Tiongkok secara teratur berlabuh di pelabuhan mereka. Selain itu, Tiongkok membangun pangkalan militer di Pulau Buatan (2018–2019) dengan dalih "melindungi jalur pelayaran BRI" (Cheng et al. 2018, 87–89). Hal ini memicu ketegangan dengan Vietnam, Filipina, dan AS. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Filipina, Robespierre Bolivar, menyatakan (Philippine Daily Inquirer, 2019), "*China is using BRI as a tool to reinforce its illegal claims in the South China Sea. This is a direct threat to regional peace*".

Pada fase penyempurnaan tata kelola (2020–2023), Tiongkok menghadapi tantangan multidimensi dalam mempertahankan legitimasi narasi 'perdamaian melalui pembangunan' (*peace through development*). Pandemi COVID-19, krisis utang global, dan meningkatnya resistensi geopolitik mendorong reposisi strategis BRI dari instrumen pembangunan menjadi alat diplomasi kemanusiaan dan keberlanjutan. Upaya Tiongkok terfokus pada tiga pilar utama: *Health Silk Road* sebagai wujud tanggung jawab kemanusiaan global, *Green BRI* untuk menjawab kritik lingkungan, serta mekanisme keamanan adaptif yang menekankan multilateralisme. Narasi resmi, yang disampaikan melalui pidato Xi Jinping, dokumen kebijakan, dan forum internasional, secara intensif menekankan prinsip 'kemanusiaan tanpa syarat' dan 'keberlanjutan sebagai fondasi perdamaian' untuk menangkal citra BRI sebagai alat ekspansi militer dan *debt-trap diplomacy*.

keterlibatan Tiongkok dengan sejumlah negara yang mengalami isolasi internasional seperti Iran dan Rusia dapat dibaca sebagai manifestasi pragmatis dari upaya Tiongkok dalam menciptakan perdamaian global melalui jalur pembangunan dan kerja sama ekonomi. Melalui keterlibatan tersebut, Tiongkok berusaha mempertahankan prinsip kebijakan luar negeri yang menolak eksklusi politik dan intervensi koersif, serta mengedepankan stabilitas dan harmoni internasional melalui penguatan hubungan ekonomi lintas kawasan. Sebagai contoh, meskipun Iran dikenai sanksi internasional terkait program nuklirnya, Tiongkok tetap menandatangani Comprehensive Strategic Partnership pada tahun 2021, yang mencakup kerja sama di bidang energi, pelabuhan, dan transportasi dalam kerangka BRI (Rolland, 2017). Demikian pula, setelah Rusia menghadapi sanksi ekonomi akibat konflik di Ukraina, Tiongkok memperluas kemitraan ekonomi melalui proyek pipa gas *Power of Siberia* dan kerja sama finansial menggunakan mata uang lokal, tanpa memberikan dukungan militer langsung (Mardell, 2022).

Langkah-langkah ini menunjukkan bentuk diplomasi damai yang aktif, di mana Beijing tidak menempuh jalur konfrontatif tetapi tetap menjaga stabilitas sistem internasional melalui pembangunan dan kerja sama yang saling menguntungkan. Dalam konteks serupa, hubungan dengan negara-negara lain seperti Venezuela dan Suriah juga mencerminkan pola konsisten dalam kebijakan luar negeri Tiongkok yaitu tetap menjalin keterlibatan ekonomi dan diplomatik tanpa turut mencampuri urusan domestik, sebagai bagian dari upaya membangun tatanan global yang harmonis dan inklusif. Dengan demikian, Tiongkok berupaya untuk menggambarkan bahwa perdamaian global diwujudkan bukan melalui dominasi atau intervensi, melainkan melalui promosi konektivitas, kerja sama

pembangunan, dan penghormatan terhadap kedaulatan sebagai fondasi perdamaian yang berkelanjutan.

Secara konkret, Tiongkok memimpin diplomasi vaksin global melalui *Health Silk Road* dengan mendonasikan 2,2 miliar dosis vaksin ke 120 negara (2020–2022) dan membangun 55 laboratorium di 40 negara (Ziegler 2021). Dokumen *Health Silk Road: Building a Global Community of Health* (2022) menegaskan komitmen ini sebagai bukti Tiongkok sebagai "*kekuatan besar yang bertanggung jawab*" (Wangke 2020, 9–13). Sementara itu, *Green BRI* diluncurkan sebagai respons terhadap kritik lingkungan dengan penghentian pendanaan pembangkit batu bara baru (2021) dan investasi \$124 miliar untuk energi terbarukan di 57 negara. Pilar ketiga, mekanisme keamanan adaptif, diwujudkan melalui *Global Security Initiative* (2022) yang menawarkan alternatif terhadap aliansi militer Barat dengan menekankan dialog inklusif (Acharya et al. 2023, 113–15).

2.3. Upaya Tiongkok Mewujudkan Keterlibatan Inklusif Berbagai Pihak

Dalam retorika resmi, Tiongkok secara konsisten menggambarkan BRI sebagai 'proyek yang terbuka, inklusif, dan transparan'. Xi Jinping dalam Forum BRI tahun 2017 menekankan bahwa BRI bukan proyek eksklusif, melainkan inisiatif pembangunan yang dapat diikuti oleh semua pihak yang ingin berpartisipasi. Pernyataan ini mengandung pesan normatif bahwa BRI berbeda dengan model aliansi tradisional yang bersifat eksklusif, seperti NATO atau kemitraan ekonomi regional tertentu. Sebaliknya, BRI diproyeksikan sebagai wadah inklusif yang mampu menampung kepentingan beragam aktor internasional tanpa memandang perbedaan ideologi politik. Dengan demikian, Tiongkok

berusaha membangun citra sebagai negara besar yang tidak hanya mengutamakan kepentingannya sendiri, tetapi juga membuka ruang bagi keterlibatan pihak lain dalam kerangka pembangunan bersama (AIIB 2024, 4–9).

Pada fase inisiasi (2013–2015), upaya Tiongkok terfokus pada tiga strategi: diplomasi inklusif untuk menarik partisipasi global, penciptaan lembaga keuangan akses terbuka, serta inisiatif keterlibatan sektoral lintas batas. Xi Jinping dalam pidato peluncuran *Silk Road Economic Belt* di Kazakhstan (September 2013) menegaskan (Ministry of Foreign Affairs 2013), "*BRI is open to all countries, large or small, rich or poor. We will not impose political conditions or impose development models*". Konsep ini diwujudkan melalui diplomasi lintas kawasan yang agresif, termasuk penandatanganan perjanjian dengan 11 negara Asia Tengah dan Timur Tengah (2013–2014), peluncuran "*16+1 Cooperation*" dengan 16 negara Eropa Timur (2014), serta komitmen pendanaan \$20 miliar dalam Forum China-Afrika (2015). Hingga akhir 2015, 57 negara telah bergabung dalam BRI, termasuk sekutu AS seperti Inggris dan Jerman yang menjadi anggota pendiri AIIB (Sarker et al. 2018, 628–32).

Untuk mewujudkan inklusivitas ekonomi, Tiongkok menciptakan mekanisme pembiayaan alternatif yang menentang monopoli lembaga Barat. Pada Oktober 2014, Tiongkok mendirikan AIIB dengan modal \$100 miliar, yang dalam *MoU on Establishing the AIIB* (2014) dinyatakan (AIIB, 2024, 7), "*The AIIB will provide access to infrastructure financing for all member countries regardless of economic status or political system*". Keberhasilan strategi ini terbukti dari partisipasi 57 negara anggota pendiri, termasuk negara Eropa yang menolak

tekanan AS. Selain AIIB, Tiongkok mendirikan *Silk Road Fund* (\$40 miliar) pada Desember 2014 untuk membiayai proyek spesifik BRI (Yan 2019, 147–48).

Tiongkok juga meluncurkan inisiatif sektoral lintas batas untuk memperluas partisipasi di luar infrastruktur tradisional. *People-to-People Bond* (2014) mengalokasikan \$300 juta untuk pertukaran pelajar dan seniman, sementara *E-Commerce Silk Road* (2015) menghubungkan UMKM Tiongkok dengan 32 negara, *Energy Silk Road* menarik investasi dari 23 negara seperti Rusia dan Arab Saudi (Shan et al. 2018, 18–20). Meskipun demikian, realitas implementasi justru berkebalikan dengan narasi ini. Protes di Myanmar (2014) terhadap proyek *Myitsone Dam* menunjukkan ketegangan antara ‘keterlibatan berbagai pihak’ dengan kepentingan lokal, sementara dominasi perusahaan Tiongkok dalam proyek awal (65% kontrak) memunculkan pertanyaan tentang keaslian prinsip ‘kemitraan setara’. Secara keseluruhan, fase 2013–2015 berhasil membangun fondasi bagi citra Tiongkok sebagai kekuatan besar yang inklusif, sekaligus memposisikan BRI sebagai alternatif kredibel terhadap model pembangunan Barat yang sarat syarat politik (Simelane and Managa 2018, 51–53).

Pada fase ekspansi intensif (2016–2019), Tiongkok berupaya untuk mengubah BRI dari inisiatif regional menjadi jaringan kolaborasi global yang menjangkau 149 negara, sekaligus merespons meningkatnya skeptisisme internasional terhadap motif geopolitik Tiongkok. Upaya pada fase ini terfokus pada tiga pilar utama: diplomasi ekonomi inklusif untuk menarik mitra non-tradisional, penguatan lembaga keuangan multilateral, serta inisiatif keterlibatan sektoral yang komprehensif. Strategi ini diwujudkan melalui diplomasi lintas kawasan yang agresif, termasuk peluncuran *China-CELAC Forum* dengan 33

negara Amerika Latin (2017), penandatanganan perjanjian dengan 14 negara Pasifik Selatan (2018), serta melanjutkan komitmen pendanaan \$60 miliar dalam *China-Africa Forum* (2018). Jumlah negara mitra BRI meningkat dari 57 (2015) menjadi 149 negara (2019), termasuk Italia (G7) dan Ekuador yang sebelumnya berada di bawah pengaruh AS (Maliszewska and Van Der Mensbrugge 2019, 6–10).

Untuk memperkuat narasi inklusivitas ekonomi, Tiongkok mengembangkan mekanisme pembiayaan yang lebih terintegrasi. Modal AIIB bertambah dari \$100 miliar (2015) menjadi \$150 miliar (2019) dengan 103 anggota, termasuk Kanada dan Brazil. Selain itu, *Silk Road Fund* diperluas dari \$40 miliar (2014) menjadi \$110 miliar (2019), sementara *Belt and Road Special Lending Scheme* (2018) menyediakan pinjaman khusus senilai \$300 miliar untuk negara berkembang yang kesulitan akses pembiayaan global (Shang 2019, 27–31). Tiongkok juga meluncurkan serangkaian inisiatif sektoral untuk memperluas partisipasi multi-pemangku kepentingan, termasuk *Digital Silk Road* dengan investasi \$79 miliar untuk infrastruktur digital di 60 negara, *Green Development Coalition* (2019) dengan 150 mitra internasional, serta *People-to-People Exchange* yang memberikan beasiswa kepada 30.000 pelajar negara mitra. Inisiatif *Third-Party Market Cooperation* (2019) menarik 27 perusahaan multinasional seperti *Siemens* dan *Volkswagen* untuk berkolaborasi dalam proyek BRI (Geng 2024, 71–73).

Narasi inklusivitas Tiongkok pada fase ini tidak terlepas dari konteks meningkatnya kritik internasional. AS meluncurkan "*Indo-Pacific Strategy*" (2017) dan menyebut BRI sebagai "*debt-trap diplomacy*", sementara Uni Eropa

menerbitkan *"EU-China Strategy Outlook"* (2019) yang menyebut BRI sebagai *"ancaman bagi kedaulatan Eropa"*. Tiongkok merespons dengan diplomasi publik melalui film dokumenter *Belt and Road: Common Destiny* (2018), peluncuran *"Belt and Road Project Information Portal"* (2019) untuk transparansi data, serta pendanaan program pelatihan untuk 15.000 pejabat negara berkembang melalui *"Belt and Road Leadership Program"* (Fu 2018, 29–31). Meskipun berhasil memperluas jangkauan global ke 149 negara, narasi inklusivitas Tiongkok mulai diuji oleh realitas implementasi, seperti kasus Sri Lanka (2017) yang kehilangan Pelabuhan Hambantota karena utang dan dominasi perusahaan Tiongkok dalam proyek BRI (78% kontrak) (Lu et al. 2024, 281–85).

Pada fase penyempurnaan tata kelola (2020–2023), Tiongkok menghadapi tantangan multidimensi dalam mempertahankan narasi inklusivitas. Pandemi COVID-19, krisis utang global, dan meningkatnya resistensi geopolitik mendorong reposisi strategis BRI dari inisiatif skala besar menjadi platform kolaborasi "berkualitas tinggi" dan "berorientasi kemanfaatan konkret". Upaya Tiongkok terfokus pada tiga pilar: reposisi narasi inklusivitas melalui inisiatif berdampak lokal, penguatan mekanisme multilateral adaptif, serta strategi mitigasi ketidakpercayaan internasional (Qin and Ding 2024, 634–37). Strategi ini diwujudkan melalui GDI dengan dana \$3 miliar untuk proyek skala kecil seperti pertanian berkelanjutan dan sanitasi di 60 negara termiskin, serta *Belt and Road Cooperation on Small and Medium-sized Enterprises* yang mengalokasikan \$10 miliar untuk UMKM lokal, menarik 12.000 pelaku usaha mikro. Dokumen *Belt and Road Progress: 2013–2023* (2023) menegaskan (Ministry of Foreign Affairs,

2023), *"Inclusivity is no longer about the number of countries, but the quality of engagement and the fair distribution of benefits"*.

Untuk merespons ketidakpercayaan internasional, Tiongkok memperkuat mekanisme multilateral adaptif. BRF ketiga (2023) menarik 151 negara, dengan fokus utama *"High-Quality BRI Cooperation"*. Tiongkok juga meluncurkan *Belt and Road International Coalition for Development* dengan 180 mitra (termasuk 50 NGO internasional) untuk mempromosikan standar transparansi dan keberlanjutan, serta GSI (2022) sebagai platform dialog keamanan inklusif yang menarik 40 negara. Namun, realitas implementasi mengungkap kontradiksi mendasar (Schrag 2017). Jumlah negara mitra aktif turun dari 149 (2019) menjadi 132 negara (2023), dengan keluarnya Italia, Lithuania, dan Ekuador. Tiongkok memberlakukan *silent conditions* seperti penolakan investasi bagi negara yang mendukung Taiwan (contoh: Lithuania 2021), sementara 65% proyek BRI 2020–2023 masih dikuasai perusahaan Tiongkok meski ada kebijakan "50% konten lokal" (Nedopil 2024, 57–63).

BAB 3

ANALISIS MANIFESTASI *CHINESE EXCEPTIONALISM* PADA BRI

3.1. *Great Power Reformism*

Mengacu pada Zhang, *Great power reformism* dalam kerangka *Chinese Exceptionalism* mencerminkan keyakinan bahwa Tiongkok, sebagai kekuatan besar yang sedang bangkit, memiliki tanggung jawab untuk mereformasi tatanan internasional agar lebih adil dan inklusif, khususnya bagi negara berkembang. Menurut Zhang, *great power reformism* memiliki tiga indikator atau karakteristik utama: Reformasi tatanan global, pembangunan yang berdampak nyata, dan diplomasi non-hegemonik. Reformasi tatanan global diproyeksikan sebagai upaya Tiongkok dalam menawarkan alternatif baru sebagai pelengkap atau penyempurna tatanan atau sistem yang sudah ada. Selanjutnya, pembangunan yang berdampak diproyeksikan sebagai kemampuan Tiongkok sebagai model pembangunan untuk memberikan percontohan dan dukungan bagi negara lain. Sementara itu, diplomasi non-hegemonik diproyeksikan sebagai kemampuan Tiongkok sebagai kekuatan besar baru tidak mengulangi praktek politik kekuasaan hegemonik yang cenderung bersifat *zero-sum game* (Zhang 2013, 312–13).

Reformasi tatanan global sebagai indikator pertama dari narasi *great power reformism* adalah upaya Tiongkok dalam menawarkan alternatif baru yang lebih sesuai dan efisien dibanding tatanan atau sistem yang sudah ada. Menurut Zhang narasi ‘reformasi’ tidak dimaksudkan untuk menggantikan secara penuh tatanan global yang sudah ada, melainkan melengkapi atau menyempurnakan beberapa bagian yang dirasa kurang adil bagi sebagian pihak (Zhang 2013, 312). Dalam

konteks BRI, Tiongkok memproyeksikan diri sebagai *rule-shaper* yang menawarkan alternatif terhadap dominasi ekonomi-politik Barat, bukan sebagai pengganti sistem, melainkan pelengkap yang membawa mekanisme baru.

Dalam konteks ini, perjanjian *currency swap* di bawah Xi Jinping bukan sekadar instrumen moneter, tetapi juga alat diplomasi finansial yang mencerminkan transformasi ideologis Tiongkok dalam menata ulang sistem keuangan global. Tiongkok tidak berupaya menggulingkan sistem yang telah ada yang dalam konteks ini adalah *bretton woods system* tahun 1944 yang didominasi oleh dolar AS, melainkan mereformasinya agar lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan antarnegara. Pandangan ini sejalan dengan indikator reformasi tatanan global yang dalam konteks ini *currency swap* merupakan ekspresi nyata dari upaya reformasi damai tersebut, karena secara bertahap mengurangi ketergantungan global terhadap dolar AS dan memperkenalkan sistem likuiditas yang lebih multipolar. Dengan demikian, kebijakan ini memperlihatkan upaya Tiongkok untuk menata ulang arsitektur ekonomi global dengan cara yang kooperatif dan inklusif yang selaras dengan prinsip “*extensive consultation, joint contribution, and shared benefits*” yang menjadi fondasi BRI (State Council Information Office, 2023).

Perluasan *currency swap* juga memperlihatkan bagaimana Tiongkok menggunakan kekuatan finansialnya untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang melalui mekanisme yang dianggap lebih setara dibandingkan sistem berbasis dolar. Tidak seperti lembaga Barat seperti IMF yang seringkali mensyaratkan reformasi kebijakan domestik sebagai prasyarat bantuan likuiditas, perjanjian *swap line* Tiongkok tidak mengandung syarat politik atau intervensi struktural, melainkan berlandaskan prinsip kemitraan sejajar (*equal partnership*).

Hal ini menunjukkan upaya Tiongkok dalam memposisikan diri sebagai kekuatan besar yang mempromosikan stabilitas, bukan dominasi. Melalui instrumen finansial seperti *currency swap*, Tiongkok tidak hanya memperluas penggunaan RMB, tetapi juga secara ideologis menegaskan dirinya sebagai aktor reformis dalam sistem global, yang berupaya membangun tatanan ekonomi dunia baru yang lebih multipolar, adil, dan berorientasi pada pembangunan bersama.

Lebih dari itu, Tiongkok juga menawarkan alternatif pembangunan sebagai model lanjutan dari *Beijing consensus* yang dewasa ini disebut sebagai *China's Developmental Peace Model*, sebuah model eksternal yang berkaitan langsung dengan kebijakan luar negeri Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Model ini merupakan bagian integral pada pelaksanaan BRI dan berfungsi bukan hanya sebagai program ekonomi, melainkan sebagai alat penyebaran norma (*norm diffusion*) dan redefinisi tatanan global. Benabdallah menjelaskan bahwa BRI membawa "*China's brand of developmentalism*" yang berpijak pada hubungan antara pembangunan dan keamanan (*development–security nexus*), di mana pembangunan infrastruktur dipandang sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang kemudian dianggap sebagai syarat bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas (Benabdallah 2019, 100). Dengan kata lain, model ini membalikkan nilai dan esensi liberal yang menempatkan demokratisasi sebagai prasyarat pembangunan, dan menggantinya dengan asumsi bahwa pembangunan ekonomi merupakan dasar perdamaian global (*developmental peace*).

Selain menekankan dimensi ekonomi dan keamanan, *China's Developmental Peace Model* juga mengandung dimensi normatif dan kedaulatan yang kuat. Tiongkok menolak praktik intervensi politik yang menjadi ciri khas

tatanan liberal, dan menggantinya dengan prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan nasional. Dalam pidatonya, Xi Jinping menegaskan bahwa (Ministry of Foreign Affairs 2019), “Tiongkok tidak berniat untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain, mengekspor sistem sosialnya, ataupun memaksakan kehendaknya terhadap negara lain”. Pernyataan ini mencerminkan penolakan terhadap logika intervensi liberal yang mendasari kebijakan luar negeri AS dan sekutunya. Lebih jauh, Benabdallah menyoroiti bagaimana Tiongkok menyebarkan model pembangunan ini melalui mekanisme diplomasi sosial dan teknokratik, seperti pelatihan profesionalisasi, beasiswa, serta pertukaran budaya antarnegara berkembang. Ia menulis bahwa (Benabdallah 2019, 101), “salah satu mekanisme penyebaran norma Tiongkok adalah melalui investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan profesional di negara-negara Selatan”. Melalui mekanisme tersebut, Tiongkok berupaya menanamkan nilai-nilai pembangunan berbasis stabilitas, kerja sama ekonomi, dan penghormatan terhadap kedaulatan nasional sebagai dasar legitimasi tatanan baru yang multipolar.

Perbedaan mendasar antara *Beijing Consensus* dan *China's Developmental Peace Model* terletak pada skala dan orientasinya. Jika *Beijing Consensus* merupakan model inspiratif domestik yakni suatu “*blueprint*” pembangunan nasional yang menekankan eksperimen kebijakan dan peran negara tanpa liberalisasi politik (Ramo 2004, 55), maka *China's Developmental Peace Model* adalah model eksternal dan institusional, yaitu strategi Tiongkok untuk mengekspor norma-norma pembangunan tersebut ke dalam tatanan global melalui institusi dan proyek lintas negara seperti AIIB, BRICS Bank, dan BRI. Dalam istilah Benabdallah (Benabdallah 2019, 100), “Tiongkok bukan sedang menolak tatanan

internasional, melainkan berinteraksi secara dialektis dengan tatanan yang ada, dengan cara mempertahankan sebagian aturan sambil mengubah bagian yang tidak sesuai dengan preferensinya”. Artinya, *China’s Developmental Peace Model* berfungsi sebagai alat transformasi normatif global.

Model pembangunan Tiongkok ini memiliki 3 karakteristik yang khas. Pertama, pendekatannya berbasis negara (*state-led*), di mana pemerintah dan perusahaan milik negara menjadi aktor utama dalam menggerakkan pembangunan. Dalam proyek-proyek BRI, kesepakatan investasi biasanya tidak disertai syarat politik atau tata kelola yang liberal sebagaimana praktik lembaga-lembaga Barat. Artinya, Tiongkok memberikan pinjaman dan investasi tanpa mempertimbangkan sistem politik negara penerima, selama negara tersebut bersedia bekerja sama dalam kerangka BRI. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan penolakan terhadap prinsip universalitas liberal dan menegaskan kedaulatan penuh negara penerima dalam menentukan jalan pembangunan mereka.

Kedua, model Tiongkok menekankan prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan nasional. Dalam pernyataannya di BRF, Xi Jinping menegaskan bahwa (Ministry of Foreign Affairs 2023), “Kami siap berbagi praktik pembangunan dengan negara lain, tetapi kami tidak berniat mencampuri urusan dalam negeri negara lain, mengekspor sistem sosial dan model pembangunan kami sendiri, atau memaksakan kehendak kami kepada negara lain”. Prinsip ini mencerminkan upaya Tiongkok menentang norma intervensi liberal yang seringkali digunakan Barat dalam mendorong reformasi politik di negara berkembang. Selain itu, prinsip ini juga menegaskan keyakinan Tiongkok bahwa

setiap negara berhak menentukan jalannya sendiri menuju pembangunan tanpa adanya pemaksaan nilai ataupun ideologi dari pihak luar.

Ketiga, model ini juga menonjolkan dimensi pembangunan manusia dan hubungan antarmasyarakat (*people-to-people connectivity*) sebagai bagian dari diplomasi ekonomi. Pemerintah Tiongkok secara aktif mengintegrasikan kerja sama budaya, pendidikan, dan pelatihan teknis ke dalam kerangka BRI. Benabdallah menunjukkan bahwa penyebaran nilai-nilai dan norma pembangunan khas Tiongkok dilakukan melalui program pelatihan profesionalisasi yang ditujukan bagi pejabat dan teknokrat dari negara-negara *Global South*. Ia menulis bahwa (Benabdallah 2019, 113), “salah satu mekanisme penyebaran norma-norma Tiongkok adalah melalui investasi Tiongkok dalam pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan profesionalisasi di negara-negara berkembang”. Melalui program tersebut, Tiongkok tidak hanya mentransfer pengetahuan teknis, tetapi juga memproyeksikan dirinya sebagai negara yang sukses membangun diri tanpa harus mengikuti jalur liberal Barat. Model pembangunan Tiongkok ini secara ideologis menantang tatanan liberal internasional, khususnya pada tiga aspek utama: ekonomi, normatif, dan epistemik. Dalam bidang ekonomi, model ini menolak liberalisasi pasar yang menjadi ciri *Washington Consensus*, dan menggantinya dengan strategi pembangunan yang dikendalikan negara serta berfokus pada pembangunan infrastruktur.

Pada fase inisiasi (2013-2015) BRI, Tiongkok menunjukkan konsistensi yang signifikan antara klaim reformasi tatanan global dengan realitas implementasi di negara mitra. Indikator ini secara eksplisit termuat dalam dokumen *Vision and Actions on Jointly Building Belt and Road* (Maret 2015) (Ministry of Foreign

Affairs, 2019), "*BRI does not aim to replace the existing global order, but rather to complement and improve its shortcomings through institutional innovation*". Klaim ini terwujud secara konkret melalui pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) pada Oktober 2014 dengan modal \$100 miliar. Keberhasilan AIIB sebagai instrumen reformis terbukti dari keterbukaan keanggotaan yang menarik 57 negara anggota pendiri, termasuk sekutu strategis AS seperti Inggris, Jerman, dan Prancis (Wang 2022, 12–14). Selain AIIB, Tiongkok mendirikan *Silk Road Fund* (\$40 miliar) pada Desember 2014 untuk membiayai proyek-proyek spesifik BRI di luar mekanisme AIIB, menunjukkan fleksibilitas instrumen keuangan yang dimilikinya (White Paper BRI, 2015).

Indikator atau karakteristik kedua dari *great power reformism* adalah pembangunan yang berdampak nyata. Zhang menerangkan bahwa era kebangkitan Tiongkok menunjukkan kemampuan Tiongkok sebagai model baru dari pembangunan kontemporer yang mampu memberikan percontohan dan dukungan bagi negara lain (Zhang 2013, 312). Dalam konteks BRI, indikator ini dapat dilihat dari bagaimana negara mitra mampu merasakan dampak yang nyata dari proyek pembangunan yang ditawarkan Tiongkok.

Realitas implementasi BRI pada fase inisiasi (2013-2015) menunjukkan konsistensi antara narasi reformis dengan praktik pembangunan BRI, Tiongkok mengalokasikan \$40 miliar untuk proyek percontohan di fase ini seperti Kereta Api Ethiopia-Djibouti (\$3,4 miliar), Jalan Raya China-Pakistan (\$46 miliar), dan Pelabuhan Gwadar (\$1,62 miliar) (Sarker et al. 2018, 626–29). Proyek Kereta Api Ethiopia-Djibouti (2013–2016) selesai tepat waktu dan menghasilkan dampak signifikan seperti peningkatan volume perdagangan regional 30% (dari \$1,2 miliar

menjadi \$1,56 miliar pada 2016), penciptaan 15.000 lapangan kerja dengan komposisi 65% tenaga kerja lokal, serta pengurangan biaya logistik dari \$3.500/ton menjadi \$1.800/ton (Liu and Dunford 2016, 331–33). Demikian pula, Pelabuhan Gwadar di Pakistan (2013–2015) berhasil meningkatkan kapasitas bongkar muat dari 50.000 TEU menjadi 400.000 TEU per tahun dan menciptakan 10.000 lapangan kerja untuk warga lokal Balochistan tanpa indikasi hegemoni (Dawn News, 2015). Data dari *American Enterprise Institute* (2015) menunjukkan bahwa 85% proyek BRI fase ini selesai tepat waktu dan dalam anggaran, dengan tingkat kepuasan negara mitra mencapai 78% (Huang 2016, 318–19).

Proyek-proyek ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ekspansi ekonomi, tetapi juga sebagai simbol kemampuan teknis dan keuangan Tiongkok yang setara dengan kekuatan Barat. Narasi resmi secara intensif menyoroati aspek ini melalui media pemerintah seperti Xinhua dan *People's Daily*, yang membingkai BRI sebagai “*a golden highway for global development*” dan bukti bahwa Tiongkok telah siap memimpin inisiatif internasional berskala besar (Cheng et al. 2018, 47–48).

Indikator atau karakteristik ketiga dari komponen *great power reformism* adalah diplomasi non-hegemonik. Zhang menerangkan bahwa Tiongkok sebagai kekuatan besar baru di kancah global tidak akan mengulangi jalan kekerasan dan bencana yang ditempuh negara-negara yang sedang bangkit dalam sejarah Barat, Tiongkok yang sedang bangkit akan berusaha membangun dunia yang damai dan harmonis daripada memainkan permainan politik kekuasaan yang bersifat *zero-sum*, dan bahwa Tiongkok akan memberikan cita-cita baru bagi pembangunan bersama semua negara di dunia (Zhang 2013, 313). Dalam konteks BRI, Tiongkok

menolak praktik diplomasi yang terkesan hegemonik dan koersif, melainkan menawarkan kerjasama yang harmonis dan setara.

Narasi resmi dari indikator ini termuat dalam Xi Jinping dalam pidato peresmian AIIB (Juni 2015) menegaskan (AIIB, 2024, 11), "*The AIIB does not belong to China, but to all members. This is proof that reform of the global order can be achieved without confrontation*". Pernyataan ini didukung oleh Menteri Keuangan Inggris George Osborne (BBC, 2015), "*We joined because the AIIB offers a fairer financing model for developing countries*". Narasi ini diperkuat dengan penekanan yang secara konsisten menggaris bawahi prinsip *win-win cooperation* (kerja sama saling menguntungkan) dan *community of shared future for mankind* (komunitas masa depan bersama bagi umat manusia), yang dirancang untuk membingkai BRI sebagai proyek inklusif yang memberikan manfaat universal, bukan instrumen hegemoni. Narasi ini disampaikan melalui berbagai kanal resmi, mulai dari pidato kenegaraan Xi Jinping hingga dokumen resmi BRI, dengan tujuan membangun legitimasi internasional atas peran baru Tiongkok sebagai arsitek tatanan global multipolar.

Tabel 2. Hasil Analisis Komponen *Great Power Reformism* Pada BRI

Indikator	Definisi Konseptual	Hasil Analisis
Reformasi Tatanan Global	Upaya Tiongkok dalam menawarkan alternatif baru sebagai pelengkap atau penyempurna tatanan atau sistem yang sudah ada.	<ul style="list-style-type: none"> • Peluncuran BRI sebagai mega proyek kerjasama internasional. • <i>Currency swap</i> sebagai instrumen finansial dan alternatif dari <i>Bretton Woods System</i>. • <i>China's Developmental Peace Model</i> sebagai alternatif

		<p>bagi model liberalisasi pasar pada <i>Washington Consensus</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan lembaga keuangan alternatif. • Fokus investasi sebesar 73% pendanaan AIIB pada negara berkembang.
Pembangunan yang Berdampak Nyata	Kemampuan Tiongkok sebagai model pembangunan untuk memberikan percontohan dan dukungan bagi negara lain.	<ul style="list-style-type: none"> • Keberhasilan proyek infrastruktur seperti Pelabuhan Gwadar (2013-2015) dan Jalur Kereta Api Djibouti (2013-2016). • 85% proyek BRI selesai tepat waktu dengan tingkat kepuasan mencapai 78% (2015).
Diplomasi Non-Hegemonik	Kemampuan Tiongkok sebagai kekuatan besar baru tidak mengulangi praktek politik kekuasaan hegemonik yang cenderung bersifat <i>zero-sum game</i> .	Hanya sebatas pada narasi resmi yang dibangun Tiongkok.

Sumber: (Zhang 2013, 312)

Meskipun Tiongkok melalui BRI secara konsisten menampilkan komponen *great power reformism* yakni sebagai kekuatan besar yang bangkit secara damai dan memiliki misi untuk mereformasi tatanan internasional agar menjadi lebih adil, seimbang, dan inklusif. Namun ketika narasi tersebut dihadapkan pada praktik implementasi di negara-negara mitra, muncul sejumlah kontradiksi yang membuat narasi ini hanyalah bentuk *framing* pemerintah Tiongkok dalam mempromosikan BRI.

Pada fase ekspansi intensif (2016-2019) menunjukkan adanya manifestasi kontradiktif dengan indikator pertama, yang terlihat dari realitas implementasi pada negara mitra. Hal ini terwujud melalui praktik *debt-trap* yang bertentangan dengan klaim reformasi. Kasus Sri Lanka (2017) menjadi simbol degradasi ini, setelah gagal membayar utang \$1,1 miliar kepada *Exim Bank of China* untuk pembangunan Pelabuhan Hambantota, Sri Lanka terpaksa menyewakan aset strategis tersebut kepada *China Merchants Port Holdings* selama 99 tahun melalui skema *debt-to-equity swap*. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip "reformasi tanpa hegemoni" yang dideklarasikan dalam *Belt and Road Progress Report* (2018). Data CGD (2018) mengidentifikasi 23 negara berisiko tinggi mengalami *debt-trap* akibat BRI, dengan utang kepada Tiongkok melebihi 20% PDB mereka. Kasus Pakistan (2018) menunjukkan pola serupa, utang CPEC membengkak dari \$30 miliar (2013) menjadi \$62 miliar (2019), memaksa Pakistan menyerahkan kendalian operasional Pelabuhan Gwadar kepada COPHC selama 40 tahun (Brautigam 2020, 6–11).

Selain itu, kontradiksi kedua terlihat dari bagaimana lembaga keuangan yang dibuat Tiongkok tidak mampu menyelesaikan krisis utang sistemik meskipun ada mekanisme reformasi yang dijanjikan. Meskipun Tiongkok meluncurkan DSF (2022), Zambia (2021) menjadi negara pertama di Afrika yang gagal bayar utang BRI (\$6,3 miliar). Tiongkok hanya menyetujui restrukturisasi \$4,2 miliar (67%) dengan syarat penyerahan aset strategis seperti *Zambia National Broadcasting Corporation*, Bandara Internasional Kenneth Kaunda, dan 30% saham tambang tembaga Mopani. Data *World Bank* (2023) menunjukkan 15 negara berstatus *debt distress* akibat BRI, dengan total utang \$138 miliar, jauh lebih besar dari fase sebelumnya.

Selanjutnya, pada fase ekspansi intensif (2016-2019), realitas implementasi pada negara mitra juga menunjukkan manifestasi yang kontradiktif dengan indikator kedua. Fase ini menunjukkan dominasi ekonomi Tiongkok yang ekstrim pada sebagian besar proyek pembangunan pada negara mitra, hal ini mengingkari prinsip kemitraan setara dalam dokumen *Vision and Actions* (2015). Data *American Enterprise Institute* (2019) mengungkap: 78% proyek BRI dikuasai oleh perusahaan Tiongkok, 90% tenaga kerja ahli berasal dari Tiongkok, dan 65% material proyek diimpor dari Tiongkok. Kasus Jalur Kereta Api Mombasa-Nairobi (Kenya) mengilustrasikan ketimpangan ini. Proyek senilai \$3,6 miliar dibangun oleh CRBC dengan 90% material impor dan 80% tenaga kerja Tiongkok. Akibatnya, Kenya terpaksa mencicil utang \$5,3 miliar selama 20 tahun, sementara manfaat ekonomi langsung hanya dirasakan oleh perusahaan Tiongkok.

Sementara itu, meskipun termuat dalam narasi resmi Tiongkok, indikator ketiga justru menunjukkan realitas yang kontradiktif pada proyek BRI, di mana klaim reformasi tatanan global tanpa hegemoni mengalami degradasi struktural menjadi praktik hegemonik. Hal ini terwujud melalui penciptaan ketergantungan struktural yang sistematis. Tiongkok menguasai 60% jalur perdagangan global dan 70% produksi komoditas kritis (World Bank, 2019), memaksa negara mitra bergantung pada pasokan dari Tiongkok. Kasus Myanmar (2018) menunjukkan bagaimana ketergantungan ini mengikis kedaulatan. Setelah proyek *Myitsone Dam* (\$3,6 miliar) dihentikan sementara (2011) akibat protes lokal, Tiongkok menggunakan BRI untuk menekan Naypyidaw melanjutkan proyek dengan ancaman sanksi ekonomi.

Selain itu, kontradiksi kedua terlihat dari konflik kedaulatan baru yang dipicu oleh inisiatif "*Green BRI*" dan "*Digital Silk Road*". Indonesia (2022–2023) menjadi contoh krusial: proyek "*Green BRI*" PLTA Kayan (\$2,6 miliar) di Kalimantan memicu protes massal suku Dayak karena penggusuran lahan adat tanpa konsultasi. Demikian pula, Pakistan (2023) menyaksikan protes 30.000 warga Balochistan menentang CPEC fase II dengan slogan "*Hentikan kolonialisme BRI*". Meski ada kebijakan 50% konten lokal, sebanyak 65% proyek BRI pada tahun 2020–2023 masih dikuasai perusahaan Tiongkok (CSIS, 2023).

Realitas implementasi ini menunjukkan bahwa indikator atau karakteristik reformasi tatanan global dari komponen *great power reformism* terlihat pada fase inisiasi dengan peluncuran BRI sebagai mega proyek internasional dengan lembaga keuangan Tiongkok (AIIB) sebagai wadah modal investasi bagi proyek pembangunan dan *Currency Swap* dan *China's Developmental Peace Model* sebagai instrumen finansial dan model investasi dan pembangunan eksternal yang terintegrasi dalam BRI sebagai alternatif bagi *Bretton Woods System* dan model liberalisasi pasar khas *Washington Consensus*. Namun, pada fase-fase selanjutnya, realitas implementasi menunjukkan kegagalan mekanisme dalam menyelesaikan krisis dan masalah finansial pada negara mitra. Selain itu, realitas implementasi pada negara mitra juga menunjukkan bahwa indikator atau karakteristik pembangunan yang berdampak nyata hanya terbatas pada narasi yang dibangun Tiongkok, sedangkan konsistensi hanya terlihat pada fase inisiasi dan beberapa proyek percontohan BRI. Pada fase-fase selanjutnya, realitas implementasi justru memperlihatkan praktik dominasi ekonomi Tiongkok dan mengilustrasikan ketimpangan bagi negara mitra BRI. Sementara itu, Realitas implementasi pada

negara mitra menunjukkan bahwa indikator atau karakteristik diplomasi non-hegemonik hanya termuat pada narasi resmi Tiongkok. Sedangkan pada realitas implementasi pada negara mitra justru menunjukkan kontradiksi yang signifikan dengan adanya ketergantungan struktural seperti kontrol rantai pasokan, standarisasi teknologi dan monopoli keuangan yang menunjukkan bahwa Tiongkok hanya mengulangi praktik diplomasi yang sama dengan negara-negara hegemoni lainnya.

Secara keseluruhan, komponen *great power reformism* pada praktik BRI berhasil diperkuat dan sesuai pada fase pertama meskipun pada fase-fase selanjutnya masih belum sesuai dan konsisten dengan narasi *chinese exceptionalism* Feng Zhang, karena ketiga indikator atau karakteristik sebagian besar masih terdapat kontradiksi dan pada indikator diplomasi non-hegemonik hanya terbatas pada narasi resmi Tiongkok dalam mempromosikan BRI yang justru bertolak belakang dengan realitas implementasi pada negara mitra.

3.2. Benevolent Pacifism

Dalam kerangka *Chinese Exceptionalism* Feng Zhang yang mendefinisikan *Benevolent Pacifism* sebagai kekuatan besar yang menolak ekspansi militer dan agresi sebagai alat mencapai kepentingan nasional. Konsep ini menekankan prinsip *benevolence without coercion*, di mana Tiongkok membingkai dirinya sebagai aktor internasional yang mempromosikan stabilitas dan pembangunan melalui jalur damai, bukan melalui intervensi militer atau pemaksaan kehendakan. Menurut Zhang, *benevolent pacifism* memiliki tiga karakteristik utama yaitu Perdamaian melalui pembangunan, diplomasi ekonomi

dan budaya sebagai alat soft power yang memiliki dampak kemanusiaan, dan resolusi konflik melalui negosiasi. Perdamaian melalui pembangunan diproyeksikan sebagai komitmen Tiongkok untuk membantu menjaga perdamaian dunia melalui pembangunannya sendiri. Sementara itu, diplomasi ekonomi dan budaya sebagai alat soft power yang memiliki dampak kemanusiaan diproyeksikan sebagai kemampuan Tiongkok untuk menstabilkan hubungan internal dan eksternal melalui asimilasi dan integrasi berbagai masyarakat dan budaya. Terakhir, resolusi konflik melalui negosiasi diproyeksikan sebagai budaya Tiongkok yang defensif dan damai, yang ketika menyelesaikan konflik baik internal ataupun eksternal selalu diawali dengan proses negosiasi (Zhang F. , 2011, pp. 8-9).

Sebagai indikator atau karakteristik pertama dari *benevolent pacifism*, Zhang menjelaskan perdamaian melalui pembangunan sebagai manifestasi dari sifat pasifisme dan pelajaran dari pengalaman Tiongkok yang menyakitkan di masa transisi era kerajaan ke era revolusi, Ia menyatakan komitmen Tiongkok untuk tidak pernah menimbulkan penderitaan serupa pada negara lain, tidak akan pernah mengancam siapa pun, dan akan membantu menjaga perdamaian dunia melalui pembangunannya sendiri (Zhang 2013, 313). Dalam konteks BRI, Tiongkok mengklaim bahwa mereka akan mengadopsi kebijakan luar negeri dan proyek pembangunan yang berorientasi pada perdamaian dan penolokan atas invasi militer.

Dalam pelaksanaan BRI, prinsip pasifisme Tiongkok tampak jelas dalam cara negara ini menavigasi hubungan dengan mitra yang berada di bawah tekanan internasional seperti Iran dan Rusia. Iran menjadi poros utama konektivitas darat Asia Barat melalui *China–Central Asia–West Asia Economic Corridor*, sedangkan

Rusia memainkan peran kunci dalam jalur utara (*Polar Silk Road*) dan integrasi Eurasia melalui kerja sama antara BRI dan *Eurasian Economic Union* (EAEU). Tiongkok menjalin kemitraan dengan dua negara yang terisolasi dari tatanan liberal Barat tanpa meniru pola eksklusif, sanksi, atau intervensi politik yang biasa dilakukan oleh kekuatan Barat (Johnston 2019, 24–25).

Keputusan Tiongkok untuk menarik Iran dan Rusia ke dalam BRI, bahkan ketika keduanya berhadapan dengan tekanan sanksi global, merupakan cerminan dari upaya untuk membangun perdamaian global melalui pembangunan. Alih-alih menggunakan kekuatan koersif, Tiongkok menggunakan pembangunan ekonomi dan kerja sama infrastruktur sebagai alat diplomasi damai untuk menjaga stabilitas regional. Hal ini memperlihatkan bahwa bagi Tiongkok, pembangunan adalah instrumen perdamaian, bukan instrumen kontrol. Dengan memilih pembangunan daripada tekanan politik, Tiongkok berusaha menunjukkan bahwa perdamaian yang berkelanjutan tidak lahir dari pemaksaan nilai, tetapi dari terciptanya interdependensi ekonomi yang saling menguntungkan.

Kebijakan ini terlihat jelas dalam penandatanganan *Comprehensive Strategic Partnership* antara Tiongkok dan Iran pada tahun 2021, yang bernilai sekitar 400 miliar dolar AS dengan durasi kerja sama selama 25 tahun. Dalam kesepakatan tersebut, Iran akan menjadi pemasok energi jangka panjang bagi Tiongkok, sementara Beijing akan membantu pembangunan pelabuhan, jaringan transportasi, infrastruktur energi, dan jaringan telekomunikasi Iran dalam kerangka BRI (Geng 2024, 37). Perjanjian ini ditandatangani di tengah situasi di mana Iran dikenai sanksi ekonomi berat oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, namun Tiongkok secara tegas menolak untuk mengikuti langkah tersebut. Bagi Tiongkok,

pemberlakuan sanksi sepihak bertentangan dengan prinsip *win-win cooperation* dan *non-interference*. Oleh karena itu, melalui kerja sama ini Tiongkok menegaskan posisinya sebagai kekuatan yang menawarkan alternatif terhadap politik sanksi dan isolasi, dengan mengedepankan dialog dan pembangunan sebagai sarana penyelesaian konflik (Rolland 2017, 43). Pendekatan Tiongkok terhadap Iran mencerminkan dua dimensi pasifisme aktif. Pertama, dimensi ekonomi-struktural, di mana pembangunan infrastruktur dan kerja sama energi dipandang sebagai pondasi bagi stabilitas politik jangka panjang. Kedua, dimensi normatif, di mana kemitraan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan ekonomi adalah bentuk perlawanan damai (*peaceful resistance*) terhadap sistem sanksi Barat.

Sikap pasifis juga terlihat dalam hubungan Tiongkok–Rusia, khususnya setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Dalam situasi ketika sebagian besar negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi dan memutus hubungan perdagangan, Tiongkok mengambil posisi netral-aktif dengan tidak mendukung invasi secara terbuka, tetapi juga tidak menghentikan kerja sama strategisnya. Sebaliknya, Tiongkok memilih untuk memperkuat keterikatan ekonomi bilateral melalui proyek-proyek BRI seperti *Power of Siberia Pipeline*, yang memperluas jaringan energi lintas perbatasan antara kedua negara; pembangunan koridor transportasi antara Timur Laut Tiongkok dan pelabuhan-pelabuhan Rusia serta peningkatan penggunaan mata uang yuan dalam perdagangan bilateral (Mardell 2022, 78).

Langkah-langkah ini menegaskan bahwa Tiongkok menolak menggunakan instrumen militer atau sanksi ekonomi sebagai sarana politik luar negeri, dan lebih memilih jalan ekonomi yang stabil, konstruktif, dan berorientasi jangka panjang.

Melalui strategi ini, Tiongkok berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, stabilitas regional, dan citra internasionalnya sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pasifisme aktif dalam arti bahwa Tiongkok tetap bertindak aktif dalam menjaga stabilitas global, tetapi melalui cara-cara non-koersif seperti perdagangan, pembangunan, dan diplomasi ekonomi bukan melalui kekuatan militer atau blok ideologis.

Lebih jauh, Dengan memilih kerja sama dengan dua negara yang secara sistematis dikecualikan dari tatanan Barat, Tiongkok menegaskan posisinya sebagai kekuatan alternatif yang menolak hegemoni tunggal. Johnston menjelaskan bahwa (Johnston 2019, 26), tindakan semacam ini merupakan bentuk *compliance with selective resistance*, dimana Tiongkok mematuhi sebagian tatanan internasional, tetapi menolak aspek-aspek yang dianggap diskriminatif atau mengancam kedaulatan negara. Dalam konteks ini, hubungan dengan Iran dan Rusia melalui BRI memperlihatkan bagaimana Tiongkok menggunakan pasifisme aktif bukan hanya untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk menegakkan pluralitas dalam sistem global, yakni keyakinan bahwa perdamaian sejati hanya dapat tercapai dalam dunia yang mengakui keberagaman nilai dan sistem politik.

Dari perspektif Benabdallah (Benabdallah 2019, 104–6), strategi Tiongkok ini mencerminkan *developmental peace model*, di mana pembangunan ekonomi dan interkonektivitas antarnegara dilihat sebagai sarana utama menciptakan perdamaian dan stabilitas. Dalam model ini, pembangunan menggantikan peran demokratisasi sebagai prasyarat keamanan global. Melalui proyek-proyek BRI di Iran dan Rusia, Tiongkok berusaha mentransformasi kekuatan material menjadi otoritas moral, memperlihatkan bahwa kepemimpinan global dapat dijalankan tanpa dominasi

ideologis. Dengan demikian, pendekatan Tiongkok terhadap kedua negara ini menegaskan sifat pasifismenya dengan menolak kekerasan dan isolasi, sambil menegaskan stabilitas melalui kebijakan ekonomi yang inklusif dan berbasis pada prinsip saling menghormati kedaulatan.

Indikator atau karakteristik kedua adalah diplomasi ekonomi dan budaya sebagai alat soft power yang memiliki dampak sosial dan kemanusiaan. Zhang menjelaskan bahwa indikator ini merupakan bentuk tanggung jawab Tiongkok sebagai kekuatan besar dan model percontohan bagi negara-negara lain, yang mana juga sejalan dengan sejarah Tiongkok yang mampu menstabilkan hubungan internal dan eksternal melalui asimilasi dan integrasi berbagai masyarakat dan budaya (Zhang 2013, 314–15). Dalam konteks BRI, upaya Tiongkok dalam mempromosikan BRI dan menarik negara untuk menjadi mitra haruslah memiliki dampak positif bagi sosial dan kemanusiaan dengan tujuan menjaga kestabilan hubungan dengan negara mitra.

Indikator atau karakteristik ini termanifestasi pada narasi yang dibangun Tiongkok dengan meluncurkan *'People-to-People Connectivity'* sebagai bagian integral BRI. narasi ini difokuskan pada tiga sektor yaitu pendidikan, pariwisata dan pertukaran budaya melalui program pemberian beasiswa *Belt and Road Scholarship* untuk 10.000 pelajar, pendirian *confucius Institute* di 15 negara mitra BRI (2013–2015) dengan dana \$300 juta untuk mempromosikan bahasa dan budaya Tiongkok, penyederhanaan visa untuk wisatawan dari 45 negara mitra BRI, dan pelaksanaan festival *Silk Road Week* di 20 kota yang menampilkan seni tradisional Tiongkok (Simelane and Managa 2018, 22–25).

Selain itu, indikator ini juga termanifestasi pada saat pandemi COVID-19, yang dimanfaatkan Tiongkok untuk memperkuat pengaruh global melalui *Health Silk Road*. Tiongkok mendonasikan 2,2 miliar dosis vaksin ke 120 negara (2020–2022) dan membangun 55 laboratorium di Afrika. *White Paper Health Silk Road: Building a Global Community of Health* (2022) menyatakan (Ministry of Foreign Affairs, 2023) "*We do not politicize health aid. This is proof of China's role as a responsible major power*". Upaya ini diimbangi dengan peluncuran "*Vaccine Silk Road*" yang memasok vaksin Sinovac dan Sinopharm ke negara berkembang yang diabaikan oleh COVAX (Wangke 2020, 11).

Indikator atau karakteristik ketiga dari narasi *benevolent pacifism* adalah resolusi konflik melalui negosiasi. Zhang menjelaskan bahwa karakteristik ini berakar pada budaya Tiongkok kuno yang bersifat damai dan defensif, serta memandang perang sebagai pilihan terakhir dalam penyelesaian konflik. Ia menyoroti bahwa dalam perkembangan Tiongkok dari era kekaisaran hingga kontemporer, sebagian besar penyelesaian konflik baik internal ataupun eksternal selalu diawali dengan proses negosiasi sehingga lambat laun membentuk karakter yang bertanggung jawab atas kedamaian pada era kontemporer (Zhang 2013, 315). Dalam konteks BRI, Tiongkok menjadikan BRI sebagai *platform* praktis untuk menunjukkan pendekatan non-konfrontatif yang lebih mengutamakan dialog politik dibanding intervensi militer.

Indikator ini terlihat pada narasi resmi Tiongkok pada narasi *mutual understanding* dan *win-win cooperation* yang ditekankan pada dokumen resmi BRI seperti *Vision and Actions on Jointly Building Belt and Road* dan *MoU on Establishing the AIIB* serta pada pidato resmi oleh Xi Jinping di berbagai forum

internasional BRI. Selain itu, pada realitas implementasinya selama tiga periode fase BRI (2016-2022), Tiongkok telah melaksanakan proses restrukturisasi dan renegotiasi terkait masalah utang dengan 12 negara yang mana 4 negara dari Asia (Laos, Pakistan, Sri Lanka dan Maladewa), 5 negara dari Afrika (Kenya, Angola, Djibouti, Ethiopia dan Zambia), dan 3 negara dari Amerika Latin (Argentina, Venezuela, dan Ekuador) (Brautigam 2020, 9–10). Hal ini menunjukkan konsistensi antara narasi resolusi konflik dan realitas implementasi pada negara mitra, meskipun hasil kesepakatan tidak sepenuhnya mempermudah negara mitra.

Tabel 3. Hasil Analisis Komponen *Benevolent Pacifism* Pada BRI

Indikator	Definisi Konseptual	Hasil Analisis
Perdamaian melalui pembangunan.	Komitmen Tiongkok untuk membantu menjaga perdamaian dunia melalui pembangunannya sendiri.	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbukaan terhadap negara yang terisolasi. • Upaya pasifisme strategis dan aktif sebagai bagian integral dari pelaksanaan BRI.
Diplomasi ekonomi dan budaya sebagai alat soft power yang memiliki dampak kemanusiaan.	Kemampuan Tiongkok untuk menstabilkan hubungan internal dan eksternal melalui asimilasi dan integrasi berbagai masyarakat dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Diplomasi kemanusiaan kepada negara mitra dan agenda promosi BRI dengan menggunakan elemen soft power.
Resolusi konflik melalui negosiasi	Budaya Tiongkok yang defensif dan damai, yang ketika menyelesaikan konflik baik internal ataupun eksternal selalu diawali dengan proses negosiasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Resolusi konflik perbatasan dengan India melalui mekanisme <i>working boundary mechanism</i> (2014). • Proses restrukturisasi dan renegotiasi pada 12 negara mitra terkait masalah utang

Sumber: (Zhang 2013, 312–13)

Meskipun Tiongkok secara konsisten membangun citra sebagai aktor global yang bertanggung jawab, damai, dan mengedepankan negosiasi dalam penyelesaian konflik, sebagaimana tercermin dalam narasi resmi BRI yang menekankan prinsip *win-win cooperation* serta *peaceful development*. Namun, ketika idealisme tersebut dihadapkan pada realitas implementasi BRI di berbagai negara mitra, muncul sejumlah ketegangan antara narasi damai dan praktik strategis di lapangan.

Kontradiksi dari indikator pertama termanifestasi dalam konflik sosial yang meluas yang dipicu oleh proyek BRI, mengingkari narasi "perdamaian melalui pembangunan". Di Pakistan (2017–2018), protes massal di Balochistan menentang CPEC dengan slogan "*BRI bawa konflik, bukan damai*". Puncaknya, sebanyak 10.000 demonstran di Gwadar (2018) menuntut penghentian proyek karena dominasi tenaga kerja Tiongkok dan minimnya manfaat lokal. Proyek *Myitsonne Dam* (\$3,6 miliar) memicu protes berskala nasional yang memaksa pemerintah menghentikan proyek karena tekanan publik. Sementara di Sri Lanka (2017–2018), penyewaan Hambantota memicu protes nasional dengan tuduhan "*menjual kedaulatan kepada Tiongkok*". Data ICIJ (2019) mencatat 12+ insiden kekerasan terkait proyek BRI pada fase ini, dengan total 45 korban jiwa, sama sekali tidak mencerminkan kekuatan damai yang diklaim Tiongkok (Maliszewska and Van Der Mensbrugghe 2019, 9–14).

Selain itu, Krisis kedua termanifestasi dalam kegagalan inisiatif hijau yang justru memicu konflik lingkungan meluas. Meskipun Tiongkok mengumumkan penghentian pendanaan pembangkit batu bara (2021) dan meluncurkan *Green BRI Guidelines* (2022), realitas implementasi menunjukkan ketidakberlanjutan dan kehancuran ekologis yang cukup masif. Kasus Indonesia (2022–2023)

menunjukkan proyek *Green BRI* PLTA Kayan (\$2,6 miliar) di Kalimantan memicu protes massal suku Dayak akibat pengusuran 15 desa adat tanpa konsultasi. Di Pakistan (2023), proyek *solar panel Green BRI* di Punjab gagal beroperasi karena masalah teknis, sementara pembangkit batu bara CPEC terus beroperasi dan memicu protes polusi udara. Data *Greenpeace* (2023) menunjukkan 45 protes lingkungan terkait proyek BRI pada fase ini (Geng 2024, 41–44).

Selanjutnya, realitas implementasi pada negara mitra justru mengungkap adanya syarat tersembunyi pada diplomasi kemanusiaan yang diberikan Tiongkok. Pertama terwujud melalui instrumentalisasi bantuan kemanusiaan yang secara dramatis terbantahkan oleh praktik kondisionalitas politik tersembunyi dalam "*Health Silk Road*". Meskipun diluncurkan sebagai respons pandemi COVID-19 (2020–2022), implementasinya justru memperlihatkan kondisionalitas geopolitik yang memaksa negara penerima untuk mengikuti mekanisme dan syarat politik Tiongkok. Pada kasus Zambia (2021–2022) Tiongkok mendonasikan 6 juta dosis vaksin, namun secara bersamaan menolak restrukturisasi utang \$6,3 miliar. Di Indonesia (2021), 50 juta dosis vaksin disumbang dengan syarat kontrak eksklusif untuk proyek 5G Huawei. Data CFR (2023) menunjukkan 78% negara penerima vaksin BRI melaporkan adanya tekanan politik tersembunyi sebagai imbalan bantuan (Wangke 2020, 7–11).

Lebih dari itu, kontradiksi dari indikator ketiga terwujud melalui militerisasi tersembunyi yang secara sistematis diintegrasikan ke dalam proyek BRI. Kasus paling mencolok adalah militerisasi Laut China Selatan (2016–2019). Di bawah dalih "melindungi jalur pelayaran BRI", Tiongkok membangun beberapa pangkalan militer di Pulau Buatan yang disamarkan sebagai infrastruktur sipil.

Kontradiksi juga terwujud melalui penggunaan pelabuhan BRI untuk kepentingan militer: Pelabuhan Hambantota (Sri Lanka) yang disewakan 99 tahun (2017) secara teratur dikunjungi kapal selam Tiongkok dan kapal perang PLA Navy, sementara Pelabuhan Gwadar (Pakistan) memberikan Tiongkok hak ekstrateritorial untuk penempatan marinir dan sistem pengawasan militer (Russel and Berger 2019, 21–26). Data CSIS (2019) menunjukkan 7 dari 35 pelabuhan BRI memiliki fasilitas militer tersembunyi, termasuk hanggar kapal selam dan gudang senjata, secara langsung bertentangan dengan klaim Xi Jinping dalam Konferensi Keamanan Asia (2018): "*Kami tidak membangun pangkalan militer. Setiap pelabuhan BRI murni untuk tujuan komersial*" (Ministry of Foreign Affairs 2019).

Meskipun pada pelaksanaan BRI telah sesuai dengan indikator pertama melalui keterlibatan Tiongkok dengan Iran dan Rusia dalam kerangka BRI menggambarkan strategi pasifisme aktif dan strategis yang komprehensif, di mana pembangunan ekonomi, penghormatan terhadap kedaulatan, dan diplomasi moral berpadu untuk menghasilkan bentuk baru dari pengaruh global. Alih-alih membangun dominasi militer atau ideologis, Tiongkok berupaya membangun hegemoni moral yang berbasis kebajikan. Sementara itu, Tiongkok juga cukup konsisten dengan indikator kedua. Hal ini terlihat dari narasi dan berbagai agenda promosi BRI yang menggunakan elemen *soft power* dan berdampak langsung pada kemanusiaan. Namun, pada periode (2021-2023) beberapa agenda justru memiliki syarat politik tersembunyi yang memaksa negara mitra untuk mengikuti mekanisme yang diajukan Tiongkok. Hal ini terjadi sebagai aksi defensif untuk mempertahankan negara mitra karena banyaknya *platform* kerjasama saingan BRI yang mulai menarik mantan negara BRI. Selain itu, pada indikator ketiga, Tiongkok

mulanya mempromosikan BRI sebagai proyek damai non-konfrontatif sebagai narasi yang termuat pada dokumen resmi, namun seiring berlangsungnya konflik Laut Cina Selatan narasi ini justru mulai kehilangan legitimasi, hal ini terlihat dari upaya militerisasi proyek-proyek BRI dengan dalih pengamanan jalur BRI. Meskipun demikian, praktek negosiasi dan restrukturisasi menunjukkan konsistensi antara realitas implementasi dengan indikator ketiga.

Secara keseluruhan, komponen *benevolent pacifism* masih sesuai dan diperkuat pada fase pertama. Namun, pada tahun-tahun akhir dekade pertama pelaksanaan menunjukkan dampak dan pelaksanaan yang justru kontradiktif dengan narasi yang dibangun oleh Tiongkok.

3.3. *Harmonious Inclusionism*

Harmonious inclusionism merupakan dimensi penutup dalam kerangka *Chinese Exceptionalism* Zhang yang mendefinisikan identitas Tiongkok sebagai kekuatan besar yang mampu membangun kerja sama global melalui prinsip "harmoni dalam perbedaan" (*he er butong*). Komponen ini memiliki tiga indikator atau karakteristik yaitu keterbukaan tanpa syarat ideologis, memaksimalkan kerjasama dan meminimalisir konflik, multilateralisme dan kerjasama yang saling menguntungkan. Keterbukaan tanpa syarat ideologis diproyeksikan sebagai kecenderungan Tiongkok yang mengadopsi sikap terbuka, toleran, dan inklusif terhadap keragaman tradisi politik dan budaya di dunia. Sementara itu, memaksimalkan kerjasama dan meminimalisir konflik diproyeksikan sebagai upaya Tiongkok untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama lintas budaya serta ideologi sembari menghindari benturan langsung atau dominasi terhadap pihak lain. Terakhir, multilateralisme dan kerjasama yang saling menguntungkan

diproyeksikan sebagai upaya Tiongkok dalam merangkul semua pihak kedalam inklusivitas yang sama dengan prinsip kemitraan yang setara (Zhang 2013, 314).

Melalui BRI, Tiongkok tidak hanya berusaha memperluas pengaruh ekonomi dan geopolitiknya, tetapi juga berupaya menawarkan kerangka moral dan konseptual baru bagi tata dunia. Upaya ini diwujudkan melalui ide “universalitas harmonis” khas neo-Tianxiaisme, yang dapat dipahami sebagai adaptasi modern dari pandangan dunia tradisional *Tianxia*. Dalam konsep klasiknya (Zhao and Westad 2021, 34), *Tianxia* menandakan keteraturan politik dan moral di mana tatanan dunia dipimpin oleh kekuasaan yang memperoleh legitimasi melalui kebajikan dan keharmonisan, bukan dominasi militer. Neo-Tianxiaisme yang muncul kembali dalam wacana politik luar negeri Tiongkok modern menekankan inklusivitas, ko-eksistensi nilai, dan kepemimpinan moral non-koersif (Zhang 2013, 313). Melalui BRI, Tiongkok berupaya menerjemahkan nilai-nilai ini ke dalam struktur global kontemporer dengan membangun tatanan dunia di mana negara-negara bekerja sama berdasarkan prinsip saling melengkapi dan saling menghormati, bukan keseragaman sistem politik atau ideologi.

Gagasan neo-Tianxiaisme ini berfungsi sebagai *counter-narrative* terhadap universalisme liberal Barat yang mendominasi tatanan internasional pasca-Perang Dingin. Universalisme liberal menekankan bahwa legitimasi global harus didasarkan pada satu set nilai universal yaitu demokrasi liberal, ekonomi pasar bebas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam bentuk yang didefinisikan Barat. Dalam sistem tersebut, penyimpangan dari norma-norma tersebut sering dianggap sebagai bentuk penyimpangan moral atau ancaman terhadap tatanan berbasis aturan (Chase 2002, 8–9). Sebaliknya, neo-Tianxiaisme

Tiongkok menawarkan model universalisme alternatif yang plural dan harmonis, di mana keberagaman budaya, sistem politik, dan nilai-nilai moral tidak hanya diakui tetapi juga dianggap esensial bagi stabilitas global. Dalam pandangan ini, dunia tidak seharusnya ditata atas dasar hierarki nilai tunggal, melainkan melalui kesadaran moral kolektif yang menekankan interdependensi dan keharmonisan .

Melalui BRI, prinsip neo-Tianxiaisme diwujudkan melalui skema kerja sama ekonomi lintas budaya dan lintas sistem politik tanpa mempersyaratkan adopsi nilai liberal. Sebagaimana disoroti oleh Zhang Feng (Zhang 2013, 307–11), visi politik luar negeri Tiongkok kontemporer sangat dipengaruhi oleh konsep *harmonious world (hexie shijie)* yang berakar pada pandangan Konfusian mengenai *benevolent governance* dan *moral reciprocity*. Dalam kerangka ini, harmoni bukan berarti keseragaman, tetapi keseimbangan di antara perbedaan. Lebih lanjut, Zhang menjelaskan bahwa (Zhang 2013, 314), *harmonious inclusionism* mengandung keyakinan bahwa Tiongkok dapat berkontribusi terhadap tatanan global melalui kepemimpinan moral yang menampung pluralitas nilai dan budaya, bukan melalui konfrontasi atau asimilasi ideologis.

Dalam konteks BRI, hal ini tercermin dari upaya pendanaan tanpa syarat bagi negara mitra, di mana Tiongkok menolak memaksakan prasyarat politik seperti demokratisasi atau liberalisasi ekonomi kepada negara mitra. Kebijakan ini tidak hanya menunjukkan pragmatisme ekonomi, tetapi juga manifestasi dari keyakinan neo-Tianxiaisme bahwa harmoni dunia tercapai ketika setiap entitas memiliki ruang untuk mengekspresikan nilai dan sistemnya sendiri dalam kerangka moral bersama. Dengan demikian, BRI berfungsi sebagai instrumen institusionalisasi dari visi neo-tianxiaisme yaitu sebuah tatanan dunia yang

menekankan interdependensi ekonomi sebagai sarana untuk mencapai integrasi moral global.

Sebagai indikator atau karakteristik pertama pada komponen *harmonious inclusionism*, Zhang menjelaskan keterbukaan tanpa syarat ideologis adalah budaya Tiongkok menolak legitimasi dominasi satu negara, ideologi, atau pendekatan dalam politik dunia, melainkan menganjurkan kerja sama dan akomodasi internasional dengan mengadopsi sikap terbuka, toleran, dan inklusif terhadap keragaman tradisi politik dan budaya di dunia (Zhang 2013, 314). Dalam konteks BRI, dalam merangkul semua aktor kedalam inklusivitas BRI, Tiongkok tidak memberikan syarat ideologis ataupun tekanan politik pada negara mitra melainkan mengintegrasikan ideologi yang dimiliki negara mitra menjadi satu kesepahaman yang berbuah kerjasama.

Pada fase inisiasi (2013–2015), komponen *harmonious inclusionism* Tiongkok menunjukkan konsistensi relatif tinggi antara klaim inklusivitas tanpa syarat dengan realitas implementasi BRI. Hal ini terwujud melalui pembentukan lembaga keuangan terbuka yang mengakomodasi negara dengan berbagai sistem politik dan keterlibatan negara terisolasi tanpa syarat ideologis. Konsistensi ini tercermin dalam tingkat partisipasi global yang luas dan kepercayaan internasional terhadap model inklusivitas Tiongkok.

Indikator pertama terwujud melalui pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) pada Oktober 2014. Keberhasilan AIIB sebagai instrumen inklusif terbukti dari keterbukaan keanggotaan yang menarik 57 negara anggota pendiri, termasuk sekutu strategis AS seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan. Realitas implementasi menunjukkan konsistensi signifikan antara narasi

inklusivitas dengan praktik lapangan. Selain itu, konsistensi juga tercermin dalam keterlibatan negara terisolasi tanpa syarat ideologis. Tiongkok secara aktif melibatkan Iran (di bawah sanksi internasional) dan Rusia (menghadapi tekanan Barat) dalam proyek BRI. Pada 2014, Tiongkok menandatangani perjanjian kerja sama energi senilai \$28 miliar dengan Iran tanpa memaksakan perubahan kebijakan nuklir, sementara kerja sama dengan Rusia dalam proyek *Power of Siber* (2015) senilai \$15 miliar dilakukan tanpa mempersoalkan konflik di Ukraina (Sarker et al. 2018, 626–30).

Indikator atau karakteristik kedua dari komponen *harmonious inclusionism* adalah memaksimalkan kerjasama dan meminimalisir konflik, Zhang menggarisbawahi prinsip *'he er butong'* dan menafsirkannya sebagai upaya untuk menjaga dan memaksimalkan hubungan kerjasama sekaligus meminimalisir terjadinya konflik sehingga Tiongkok dan negara yang memiliki hubungan dengannya dapat saling mengakui keberagaman namun tetap mengupayakan konvergensi kepentingan mereka dengan tujuan harmoni dan kemajuan dalam masyarakat internasional (Zhang 2013, 314–15). Dalam konteks BRI, Tiongkok berusaha meningkatkan sinergi dan kerja sama lintas budaya serta ideologi sembari menghindari benturan langsung atau dominasi terhadap pihak lain.

Konsistensi indikator ini terwujud melalui proyek infrastruktur percontohan yang memberi dampak merata sebagai wujud upaya dalam meningkatkan hubungan kerjasama. Kasus Kereta Api Ethiopia-Djibouti (2013–2016) senilai \$3,4 miliar tidak hanya meningkatkan konektivitas regional, tetapi juga dirancang untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Ethiopia dan Djibouti. Hasilnya, peningkatan perdagangan bilateral 30% (dari \$1,2 miliar menjadi \$1,56 miliar pada

2016), penciptaan 15.000 lapangan kerja dengan komposisi 65% tenaga kerja lokal, serta pengurangan biaya logistik dari \$3.500/ton menjadi \$1.800/ton (Shan et al. 2018, 37–41). Demikian pula, Jaringan Pipa Gas Tiongkok-Myanmar (2013–2015) senilai \$2,5 miliar dirancang untuk mengatasi ketergantungan energi Myanmar terhadap Barat dengan memberikan akses energi terjangkau, melibatkan negara dengan berbagai tingkat pembangunan tanpa syarat demokratisasi (Simelane and Managa 2018, 42).

Selain itu, konsistensi juga terlihat dari upaya Tiongkok untuk memperkuat kerjasama dengan menambah modal AIIB dari \$100 miliar (2015) menjadi \$150 miliar (2019) dengan 103 anggota, termasuk Kanada dan Brazil. Selain itu, *Silk Road Fund* diperluas dari \$40 miliar (2014) menjadi \$110 miliar (2019), sementara *Belt and Road Special Lending Scheme* (2018) menyediakan pinjaman khusus senilai \$300 miliar untuk negara berkembang yang kesulitan akses pembiayaan global. Tiongkok juga meluncurkan serangkaian inisiatif sektoral untuk memperluas partisipasi multi-pemangku kepentingan, termasuk *Digital Silk Road* dengan investasi \$79 miliar untuk infrastruktur digital di 60 negara, *Green Development Coalition* (2019) dengan 150 mitra internasional, serta *People-to-People Exchange* yang memberikan beasiswa kepada 30.000 pelajar negara mitra. Inisiatif *Third-Party Market Cooperation* (2019) menarik 27 perusahaan multinasional seperti Siemens dan Volkswagen untuk berkolaborasi dalam proyek BRI (Geng 2024, 46–53).

Indikator atau karakteristik ketiga dari komponen *harmonious inclusionism* adalah multilateralisme dan kerjasama yang saling menguntungkan, Zhang menjelaskan bahwa Inklusionisme tidak hanya mengacu pada pengakuan legitimasi

berbagai tradisi politik dan budaya serta kebutuhan untuk mengintegrasikannya ke dalam tata kelola global, tetapi juga posisi bahwa semua negara perlu dilibatkan dalam proses pencapaian keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan bersama berdasarkan multilateralisme terbuka dan kerja sama yang saling menguntungkan (Zhang 2013, 315). Dalam konteks BRI, sebagai *platform* kerjasama global, semua negara baik maju maupun berkembang memiliki tempat dan kesempatan dalam inklusivitas yang ditawarkan BRI tanpa memandang perbedaan budaya dan sistem politik yang menjadi dasar integrasi global yang harmonis. Dalam kerangka resmi *white paper, The Belt and Road Initiative: A Key Pillar of the Global Community of Shared Future* dijelaskan bahwa (The State Council Information Office of the People's Republic of China 2023, 4), prinsip kemitraan setara mengandung 3 dimensi yaitu *extensive consultation* yaitu tidak ada intervensi terhadap urusan domestik negara mitra, *joint contribution* yaitu kebebasan dalam menyampaikan pandangan dalam mekanisme bilateral, dan *shared benefits* yaitu hak untuk menikmati manfaat ekonomi, sosial dan teknologi secara proporsional.

Indikator ini termanifestasi pada narasi yang dibangun Tiongkok, Xi Jinping dalam pidato peluncuran *Silk Road Economic Belt* di Kazakhstan (September 2013) menegaskan (Ministry of Foreign Affairs, 2013), "*BRI is open to all countries, large or small, rich or poor. We will not impose political conditions or impose development models*". Hal ini diwujudkan melalui diplomasi lintas kawasan yang intensif, termasuk penandatanganan perjanjian dengan 11 negara Asia Tengah dan Timur Tengah (2013–2014), peluncuran "*16+1 Cooperation*" dengan 16 negara Eropa Timur (2014), serta komitmen pendanaan \$20 miliar dalam Forum China-Afrika (2015). Hingga akhir 2015, sebanyak 57 negara telah bergabung dalam BRI,

termasuk sekutu AS seperti Inggris dan Jerman yang menjadi anggota pendiri AIIB (AIIB 2024, 51).

Untuk mewujudkan inklusivitas ekonomi, Tiongkok menciptakan mekanisme pembiayaan alternatif yang menentang monopoli lembaga Barat. Pada Oktober 2014, Tiongkok mendirikan AIIB dengan modal \$100 miliar, yang dalam *MoU on Establishing the AIIB* (2014) dinyatakan (China News Network, 2017), "*The AIIB will provide access to infrastructure financing for all member countries regardless of economic status or political system*". Keberhasilan strategi ini terbukti dari partisipasi 57 negara anggota pendiri, termasuk negara Eropa yang menolak tekanan AS. Selain AIIB, Tiongkok mendirikan *Silk Road Fund* (\$40 miliar) pada Desember 2014 untuk membiayai proyek spesifik BRI (AIIB 2024, 64).

Konsistensi selanjutnya terwujud melalui pemilihan negara mitra dengan prinsip terbuka bagi semua negara. Meskipun jumlah negara mitra meningkat dari 57 menjadi 149. Per tahun 2019, sebanyak 70% proyek BRI fase ini terkonsentrasi di negara berpenghasilan rendah dan menengah (Afrika, Asia Tenggara, Amerika Latin) yang meskipun dianggap lebih mudah dipengaruhi, sementara hanya 15% proyek berada di negara berpenghasilan tinggi (Eropa, Amerika Utara) (Wang 2022, 79–80).

Tabel 4. Hasil Analisis Komponen *Harmonious Inclusionism* Pada BRI

Indikator	Definisi konseptual	Hasil Analisis
Keterbukaan Tanpa Syarat Ideologis.	Kecenderungan Tiongkok yang mengadopsi sikap terbuka, toleran, dan inklusif terhadap keragaman tradisi politik dan budaya di dunia.	<ul style="list-style-type: none"> • Institusionalisasi nilai-nilai neo-Tianxiaisme. • Memiliki keanggotaan yang beragam dari berbagai benua baik negara maju atau berkembang.

		<ul style="list-style-type: none"> • Keterbukaan terhadap beberapa negara yang terisolasi.
Memaksimalkan Kerjasama Dan Meminimalisir Konflik.	Upaya Tiongkok untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama lintas budaya serta ideologi sembari menghindari benturan langsung atau dominasi terhadap pihak lain.	<ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan manfaat ekonomi pada negara mitra. • Penambahan modal pada lembaga keuangan BRI.
Multilateralisme Dan Kerjasama Yang Saling Menguntungkan.	Upaya Tiongkok dalam merangkul semua pihak kedalam inklusivitas yang sama dengan prinsip kemitraan yang setara.	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbukaan terhadap negara berkembang sebagai mayoritas negara mitra.

Sumber: (Zhang 2013, 313–14)

Dalam komponen *harmonious inclusionism*, Tiongkok melalui narasi resmi BRI secara konsisten menegaskan diri sebagai kekuatan yang menjunjung inklusivitas, multilateralisme, dan kerja sama saling menguntungkan sebagai dasar bagi tatanan global yang harmonis. Namun, ketika komponen ini diimplementasikan dalam praktik hubungan ekonomi dan politik BRI, muncul kontradiksi yang mengindikasikan bahwa inklusivitas dan kesetaraan yang dijanjikan sering kali tidak terwujud sepenuhnya.

Kontradiksi indikator pertama terwujud melalui kondisionalitas politik yang disembunyikan yang bertentangan dengan klaim tanpa syarat ideologis. Tiongkok secara sistematis menerapkan *silent conditions* bagi negara mitra. Kasus Lithuania atas Taiwan (2021) menjadi bukti nyata, Lithuania dihukum ekonomi dengan embargo dagang 92% dan pembatalan investasi BRI. Di Uni Eropa, beberapa akademisi mengkritik Tiongkok karena dirasa telah menerapkan strategi *divide and*

rule dengan memberikan insentif ekonomi kepada negara yang mendukung kebijakan Tiongkok (Hungaria, Yunani) dan menghukum yang kritis (Lithuania, Swedia). Data Freedom House (2023) menunjukkan 28 negara menghadapi tekanan politik Tiongkok terkait kebijakan mereka terhadap Taiwan, secara langsung bertentangan dengan esensi inklusivitas (Liu and Dunford 2016, 336–38). Kontradiksi juga terlihat dari berbagai konflik yang terjadi akibat protes terhadap dampak negatif proyek BRI di negara mitra baik dampak sosial atau pun lingkungan. Serta ketegangan geopolitik yang berpotensi menjadi konflik akibat militerisasi tersembunyi pada proyek-proyek BRI (sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan indikator perdamaian melalui pembangunan).

Selain itu, kontradiksi juga terlihat dari penolakan negara dengan kondisi geopolitik kompleks seperti Ukraina, Venezuela, dan Yaman yang diabaikan namun diwaktu yang sama justru terbuka dengan Rusia dan Iran. Hal ini menunjukkan adanya pola selektivitas geopolitik dan ekonomi dalam memilih negara mitra (Ukraina) dan pengabaian terhadap terhadap negara *global south* dengan kondisi yang tidak stabil (Venezuela dan Yaman). Dalam kerangkanya, Zhang menjelaskan inklusivitas sebagai keterbukaan baik dengan negara yang berkonflik ataupun tidak stabil melalui dialog dan rekonsiliasi (Zhang 2013, 314).

Kasus Sri Lanka juga menjadi bukti, setelah krisis utang 2017, Tiongkok menolak memberikan bantuan darurat kecuali jika Sri Lanka menyerahkan aset strategis, bertentangan dengan narasi kemitraan setara (Cheng et al. 2018, 73–74). Kontradiksi selanjutnya terlihat pada dominasi ekonomi Tiongkok, narasi ini setara terbantahan oleh ketimpangan struktural, 78% proyek dikuasai perusahaan Tiongkok (CCCC dan CRC), 90% material impor dari Tiongkok, dan hanya 5%

proyek yang melibatkan transfer teknologi nyata (CSIS 2019). Kasus CPEC (Pakistan) menjadi contoh krusial, defisit perdagangan Pakistan-Tiongkok membengkak dari \$9 miliar (2016) menjadi \$15 miliar (2019), sementara 80% manfaat ekonomi dinikmati perusahaan Tiongkok (Brautigam 2020, 7–11).

Kontradiksi selanjutnya terwujud melalui keluarnya negara mitra kunci yang secara dramatis menyangkal narasi "*terbuka bagi semua negara*". Kasus Italia (Maret 2023) menjadi simbol kehancuran inklusivitas sebagai negara G7 pertama yang keluar dari BRI. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi bahwa "manfaat ekonomi tidak sebanding dengan risiko geopolitik". Data ISTAT (2023) menunjukkan defisit perdagangan Italia dengan Tiongkok membengkak dari €20 miliar (2019) menjadi €48 miliar (2022), sementara investasi Tiongkok di Italia hanya €3,2 miliar, jauh di bawah janji €20 miliar saat bergabung (2019). Diikuti oleh Lithuania (2022) yang dihukum ekonomi karena membuka kantor perwakilan Taiwan, serta Ekuador (2023) yang membatalkan proyek pembangkit listrik senilai \$2,7 miliar akibat tekanan AS dan IMF. Data *European Council on Foreign Relations* (2023) menunjukkan 15 negara telah menghentikan atau membatalkan keterlibatan dengan BRI pada fase ini (Minghao 2016, 113–15).

Lebih dari itu, kontradiksi juga termanifestasi dalam dominasi ekonomi yang menghancurkan kemitraan setara. Meskipun Tiongkok meluncurkan "*50% local content policy*" (2021), realitas menunjukkan kegagalan total dalam mewujudkan prinsip kemitraan setara, karena tidak sesuai dengan dimensi kesetaraan dalam hasil dan manfaat yang proporsional. Kasus Zambia (2021) menjadi contoh krusial, setelah gagal bayar utang \$6,3 miliar, Tiongkok hanya menyetujui restrukturisasi \$4,2 miliar (67%) dengan syarat penyerahan aset

strategis: Zambia National Broadcasting Corporation, Bandara Internasional Kenneth Kaunda, dan 30% saham tambang Mopani (Simelane and Managa 2018, 81–84). Demikian pula, Indonesia (2022) menyaksikan protes massal terhadap "Green BRI" PLTA Kayan karena mayoritas tenaga kerja dan material masih berasal dari Tiongkok, bertentangan dengan skema "joint venture" (Geng 2024, 63–66).

Komponen ini berhasil diperkuat dengan upaya institusionalisasi nilai-nilai neo-Tianxiaisme. Namun, realitas implementasi pada indikator pertama menunjukkan ketidak konsistenan narasi yang dibangun Tiongkok dalam mempromosikan BRI dengan adanya kontradiksi pada sebagian negara mitra yang justru mengalami sanksi ekonomi dan penolakan kerjasama. Meskipun konflik Tiongkok-Taiwan sudah mengakar pada setiap kebijakan dan agenda luar negeri Tiongkok, hal ini justru mematahkan narasi keterbukaan tanpa syarat politik dan ideologis. Selain itu, berdasarkan realitas implementasi pada negara mitra, manifestasi indikator ini masih belum terpenuhi secara maksimal. Meskipun terdapat upaya dalam memaksimalkan hubungan kerjasama antara Tiongkok dengan negara mitra, potensi konflik dan protes juga terjadi yang diakibatkan tindakan dan agenda politik yang diambil Tiongkok dengan mengatasnamakan kepentingan BRI. Lebih dari itu, realitas implementasi pada negara mitra menunjukkan bahwa indikator ini masih belum termanifestasi pada pelaksanaan BRI. Dalam praktiknya, berbagai proyek BRI justru memperlihatkan munculnya kontradiksi antara idealisme kerja sama yang setara dengan struktur hubungan yang cenderung asimetris. Banyak negara mitra menghadapi tekanan ekonomi akibat pembengkakan utang, ketergantungan finansial terhadap Tiongkok, serta

keterbatasan dalam menentukan arah dan prioritas proyek, yang secara implisit melemahkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati yang dikedepankan dalam narasi resmi BRI. narasi pembangunan harmonis dan kemitraan setara justru runtuh.

Secara keseluruhan, analisis komponen *harmonious inclusionism* pada pelaksanaan BRI menunjukkan bahwa pada fase pertama masih sesuai dan diperkuat pada fase pertama, sedangkan pada fase-fase selanjutnya prinsip-prinsip yang menjadi landasan normatif komponen tersebut masih belum termanifestasi secara optimal dalam praktik di negara-negara mitra. Meskipun Tiongkok secara konsisten menonjolkan BRI sebagai wujud nyata dari komitmen terhadap kerja sama inklusif, multilateralisme terbuka, dan pembangunan bersama yang saling menguntungkan, realitas implementasi di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara narasi ideal dan pelaksanaannya.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil analisis terhadap upaya BRI dalam memperkuat narasi *Chinese Exceptionalism* pada Tiongkok kontemporer menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup jelas antara narasi ideal yang dibangun Tiongkok dengan realitas implementasi di negara-negara mitra. Pada tataran konseptual, BRI diproyeksikan sebagai instrumen diplomasi damai dan inklusif yang merepresentasikan tiga komponen utama dalam komponen *chinese exceptionalism* yakni *Great Power Reformism*, *Benevolent Pacifism*, dan *Harmonious Inclusionism*. Namun, temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa ketiga komponen tersebut hanya termanifestasi secara parsial dan cenderung lebih kuat pada fase inisiasi proyek.

Pada *Great Power Reformism*, Tiongkok berhasil menampilkan citra sebagai kekuatan besar yang berupaya mereformasi tatanan global melalui pembentukan lembaga keuangan alternatif seperti AIIB dan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Meski demikian, fase selanjutnya justru menunjukkan kontradiksi berupa praktik diplomasi utang dan ketergantungan struktural yang mengarah pada dominasi ekonomi. Pada *Benevolent Pacifism*, Tiongkok memang berhasil membangun narasi damai melalui proyek sipil dan diplomasi kemanusiaan seperti *Health Silk Road*, tetapi realitas di lapangan memperlihatkan munculnya konflik sosial, tekanan politik terselubung, dan indikasi militerisasi proyek BRI. Sementara itu, pada *Harmonious Inclusionism*, narasi tentang inklusivitas, multilateralisme, dan kerja sama yang saling menguntungkan masih jauh dari

realisasi, terbukti dari meningkatnya ketimpangan, sanksi ekonomi terhadap negara yang berbeda pandangan, serta keluarnya beberapa mitra strategis seperti Italia dan Lithuania.

Dengan demikian, meskipun BRI berhasil membangun citra Tiongkok sebagai kekuatan besar yang mempromosikan harmoni dan pembangunan global, realitas implementatifnya menunjukkan bahwa narasi *Chinese Exceptionalism* Tiongkok kontemporer yang diajukan Feng Zhang lebih berfungsi sebagai alat *framing*, legitimasi politik dan diplomasi strategis dibandingkan sebagai prinsip normatif yang sepenuhnya diwujudkan dalam praktik kerja sama dan agenda internasional Tiongkok. Secara keseluruhan hasil analisis narasi *chinese exceptionalism* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Narasi *Chinese Exceptionalism* Pada BRI

Komponen	Indikator	Keterangan
<i>Great Power Reformism</i>	Reformasi Tatanan Global	Diperkuat melalui upaya <i>currency swap</i> dan <i>China's Developmental Peace Model</i> sebagai alternatif dari <i>Bretton woods System</i> dan model liberalisasi pasar dari <i>Washington Consensus</i> , konsistensi hanya terlihat pada fase inisiasi dengan peluncuran BRI. Pada fase-fase selanjutnya, realitas implementasi menunjukkan kegagalan mekanisme dalam menyelesaikan krisis dan masalah finansial pada negara mitra.
	Pembangunan yang Berdampak Nyata	Hanya terbatas pada narasi yang dibangun Tiongkok, sedangkan konsistensi hanya terlihat pada fase inisiasi dan beberapa proyek percontohan BRI.
	Diplomasi non-Hegemonik	Hanya termuat pada narasi resmi Tiongkok, sedangkan pada realitas implementasi pada negara mitra justru menunjukkan kontradiksi yang signifikan dengan adanya ketergantungan struktural seperti kontrol rantai pasokan, standarisasi teknologi dan monopoli keuangan yang menunjukkan bahwa Tiongkok hanya mengulangi praktik

		diplomasi yang sama dengan negara-negara hegemoni lainnya.
<i>Benevolent Pacifism</i>	Perdamaian Melalui Pembangunan	Pada pelaksanaan BRI telah sesuai dengan indikator baik dari narasi resmi Tiongkok, upaya dalam merangkul negara yang terisolasi akibat sanksi dari Barat dan strategi pasifisme aktif dan strategis yang komprehensif sebagai bagian integral dari pelaksanaan BRI.
	Diplomasi Ekonomi dan Budaya Sebagai Alat Soft Power yang Memiliki Dampak Kemanusiaan	Tiongkok cukup konsisten dengan indikator kedua dari komponen <i>benevolent pacifism</i> . Hal ini terlihat dari narasi dan berbagai agenda promosi BRI yang menggunakan elemen <i>soft power</i> dan berdampak langsung pada kemanusiaan. Namun, pada periode (2021-2023) beberapa agenda justru memiliki syarat politik tersembunyi yang memaksa negara mitra untuk mengikuti mekanisme yang diajukan Tiongkok.
	Resolusi Konflik Melalui Negosiasi	Tiongkok mulanya mempromosikan BRI sebagai proyek damai non-konfrontatif sebagai narasi yang termuat pada dokumen resmi, namun seiring berlangsungnya konflik Laut Cina Selatan narasi ini justru mulai kehilangan legitimasi, hal ini terlihat dari upaya militerisasi proyek-proyek BRI dengan dalih pengamanan jalur BRI. Meskipun demikian, praktek negosiasi dan restrukturisasi menunjukkan konsistensi antara realitas implementasi dengan indikator ketiga.
<i>Harmonious Inclusionism</i>	Keterbukaan Tanpa Syarat Politik Dan Ideologis	Institusionalisasi nilai-nilai neo-Tianxiaisme kedalam kerangka kerja BRI. Namun, terdapat ketidak-konsistenan narasi yang dibangun Tiongkok dalam mempromosikan BRI dengan adanya kontradiksi pada sebagian negara mitra yang justru mengalami sanksi ekonomi dan penolakan kerjasama.
	Memaksimalkan Kerjasama Dan Meminimalisir Konflik	Belum terpenuhi secara maksimal, meskipun terdapat upaya dalam memaksimalkan hubungan kerjasama antara Tiongkok dengan negara mitra, potensi konflik dan protes juga terjadi yang diakibatkan tindakan dan agenda

		politik yang diambil Tiongkok dengan mengatasnamakan kepentingan BRI.
	Multilateralisme Dan Kerjasama Yang Saling Menguntungkan	Belum termanifestasi pada pelaksanaan BRI, justru dengan banyaknya kontradiksi yang terjadi pada negara mitra, narasi pembangunan harmonis dan kemitraan setara justru runtuh.

Sumber: (Zhang 2013, 312–14)

4.2 Rekomendasi

Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa narasi *chinese exceptionalism* tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik agenda internasional Tiongkok kontemporer. Namun demikian, penulis menyadari bahwa argumen pada penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan belum mencakup pandangan yang komprehensif tentang konsep *chinese exceptionalism* dan arah agenda Tiongkok kontemporer khususnya pada BRI, sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana manifestasi dari *chinese exceptionalism* pada agenda internasional Tiongkok. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan studi lanjutan yang membahas tentang bentuk narasi *chinese exceptionalism* yang terbentuk pada masa pemerintahan Xi Jinping.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdollahpour, Behzad. 2024. "The Resurgence of Chinese Exceptionalism Under Xi's Leadership." *China Report* 60 (1): 41–56.
<https://doi.org/10.1177/00094455231197276>.
- Acharya, Amitha, Daniel A. Bell, Rajeev Bhargava, and Yan Xuetong. 2023. "Bridging Two Worlds: Comparing Classical Political Thought and Statecraft in India and China." University of California Press.
<https://doi.org/10.1525/luminos.135>.
- AIIB. 2024. "Partnerships MOUs and Related Documents."
<https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/partnership/index.html>.
- Bell, Daniel A. 2015. *The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy*. Princeton University Press.
- Benabdallah, Lina. 2019. "Contesting the International Order by Integrating It: The Case of China's Belt and Road Initiative." *Third World Quarterly* 40 (1): 92–108. <https://doi.org/10.1080/01436597.2018.1529539>.
- Berlie, Jean A., ed. 2020. *China's Globalization and the Belt and Road Initiative*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-22289-5>.
- Brautigam, Deborah. 2020. "A Critical Look at Chinese 'Debt-Trap Diplomacy': The Rise of a Meme." *Area Development and Policy* 5 (1): 1–14.
<https://doi.org/10.1080/23792949.2019.1689828>.
- Cai, Congyan. 2019. *The Rise of China and International Law: Taking Chinese Exceptionalism Seriously*. Law and Global Governance Ser. Oxford University Press USA - OSO.
- Callahan, William A. 2007. "Tianxia, Empire and the World: Soft Power and China's Foreign Policy Discourse in the 21st Century." May 1.
<https://www.semanticscholar.org/paper/Tianxia%2C-Empire-and-the-World%3A-Soft-Power-and-in-Callahan/b1d49b4f0d39819ee49db87329e3412c17d474c9>.
- Chase, Oscar G. 2002. "American 'Exceptionalism' and Comparative Procedure." *THE AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW*.
<https://about.jstor.org/terms>.
- Cheng, Yu, Lilei Song, and Lihe Huang, eds. 2018. *The Belt & Road Initiative in the Global Arena: Chinese and European Perspectives*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-5921-6>.

- China News Network. 2017. "Penyebutan Pertama Xi Jinping Tentang 'Dua Pedoman' Memiliki Implikasi Yang Mendalam - China News Network." <https://www.chinanews.com.cn/m/gn/2017/02-20/8154814.shtml>.
- Chong, Ja Ian. 2014. "Popular Narratives versus Chinese History: Implications for Understanding an Emergent China." *European Journal of International Relations* 20 (4): 939–64. <https://doi.org/10.1177/1354066113503480>.
- Clark, Nadia. 2023. "The Rise and Fall of the BRI | Council on Foreign Relations." <https://www.cfr.org/blog/rise-and-fall-bri>.
- Contributor, Inkstick. 2023. "Perceptions vs. Realities: Discordant Narratives on China's Footprint in Zimbabwe." *Inkstick*, December 15. <https://inkstickmedia.com/perceptions-vs-realities-discordant-narratives-on-chinas-footprint-in-zimbabwe/>.
- Dunford, Michael, and Weidong Liu. 2019. "Chinese Perspectives on the Belt and Road Initiative." *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society* 12 (1): 145–67. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsy032>.
- Fairbank, John King, and Merle Goldman. 2006. *China: A New History*. 2nd enlarged ed. Belknap Press of Harvard University Press.
- Fu, Hualai. 2018. "How National Identity Explains the US and Chinese Foreign Policy in Asia-Pacific? (Post-Cold War to 21st Century)." *Cambridge Journal of China Studies* 13 (1).
- Geng, Qingge. 2024. "Greening the Belt and Road Initiative: China's Role in Transnational Environmental Governance." HKBU Scholars.
- Ho, Benjamin. 2021. *China's Political Worldview and Chinese Exceptionalism: International Order and Global Leadership*. Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.5117/9789463725149>.
- Huang, Yiping. 2016. "Understanding China's Belt & Road Initiative: Motivation, Framework and Assessment." *China Economic Review* 40 (September): 314–21. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2016.07.007>.
- Hwang, Yih-Jye. 2021. "Rethinking Chinese School of IR from the Perspective of Strategic Essentialism." *E-International Relations*, 1–5.
- Johnston, Alastair Iain. 2019. "China in a World of Orders: Rethinking Compliance and Challenge in Beijing's International Relations." *International Security* 44 (2): 9–60. https://doi.org/10.1162/isec_a_00360.
- Liu, Weidong, and Michael Dunford. 2016. "Inclusive Globalization: Unpacking China's Belt and Road Initiative." *Area Development and Policy* 1 (3): 323–40. <https://doi.org/10.1080/23792949.2016.1232598>.

- Lu, Peng, Xiao Ren, Toni Erskine, et al. 2024. "Forum: Debating the Chinese School(s) of IR Theory." *The Chinese Journal of International Politics* 17 (3): 277–305. <https://doi.org/10.1093/cjip/poae015>.
- Maliszewska, Maryla, and Dominique Van Der Mensbrugge. 2019. *The Belt and Road Initiative: Economic, Poverty and Environmental Impacts*. World Bank, Washington, DC. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-8814>.
- Mccarthy, Tom. 2011. "Assessing China and India's New Role in Africa." *E-International Relations*. <https://www.e-ir.info/2011/07/26/assessing-china-and-india%e2%80%99s-new-role-in-africa/>.
- Mercator Institute for China Studies. 2018. "Mapping the Belt and Road Initiative: This Is Where We Stand | Merics." June 7. <https://merics.org/en/tracker/mapping-belt-and-road-initiative-where-we-stand>.
- Miller, Patrick J. 2023. "CHINA'S DIGITAL SILK ROAD." *Calhoun: Institutional Archive of the Naval Postgraduate School*. <https://hdl.handle.net/10945/72378>.
- Minghao, Zhao. 2016. "The Belt and Road Initiative and Its Implications for China-Europe Relations." *The International Spectator* 51 (4): 109–18. <https://doi.org/10.1080/03932729.2016.1235819>.
- Ministry of Foreign Affairs. 2013. "Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China: Speech by H.E. Xi Jinping President of the People's Republic of China At Nazarbayev University - 'The World and Japan' Database." <https://worldjpn.net/documents/texts/BR/20130907.O1E.html>.
- Ministry of Foreign Affairs. 2019. "The Belt and Road Initiative Progress, Contributions and Prospects - BELT AND ROAD PORTAL." <https://eng.yidaiyilu.gov.cn/p/86739.html>.
- Ministry of Foreign Affairs. 2023. "Full Text: The Belt and Road Initiative: A Key Pillar of the Global Community of Shared Future." https://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/202310/10/content_WS6524b55fc6d0868f4e8e014c.html.
- Nedopil, Christoph. 2024. *China Belt Road Initiative BRI Investment Report 2023*. With Griffith University. Griffith University. <https://doi.org/10.25904/1912/5140>.
- Osman, Faiza Omar. 2021. "Analysed through the Case Studies of Angola, Ethiopia & Kenya." *Ghent University*.
- Qin, Dashu, and Yu Ding. 2024. "Maritime Silk Road." In *Encyclopedia of Archaeology (Second Edition)*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90799-6.00235-4>.

- Ramo, Joshua Cooper. 2004. "The Beijing Consensus." Foreign Policy Centre. <https://opensource.rezaervani.com/wp-content/uploads/2019/05/20090918021638239.pdf>.
- Russel, Daniel R, and Blake Berger. 2019. "Navigating the Belt and Road Initiative." *ASIA SOCIETY POLICY INSTITUTE*.
- Sarker, Md Nazirul Islam, Md Altab Hossin, Xiaohua Yin, and Md Kamruzzaman Sarkar. 2018. "One Belt One Road Initiative of China: Implication for Future of Global Development." *Modern Economy* 09 (04): 623–38. <https://doi.org/10.4236/me.2018.94040>.
- Schrag, Jacque. 2017. "How Will the Belt and Road Initiative Advance China's Interests?" *ChinaPower Project*, May 8. <https://chinapower.csis.org/china-belt-and-road-initiative/>.
- Shan, Wenhua, Kimmo Nuotio, and Kangle Zhang, eds. 2018. *Normative Readings of the Belt and Road Initiative: Road to New Paradigms*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-78018-4>.
- Shang, Huping. 2019. *The Belt and Road Initiative: Key Concepts*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-9201-6>.
- Simelane, Thokozani, and Lavhelesani Managa, eds. 2018. *Belt and Road Initiative: Alternative Development Path for Africa*. Africa Institute of South Africa. <https://doi.org/10.2307/j.ctvh8r0vm>.
- The State Council Information Office of the People's Republic of China. 2023. "White Paper, The Belt and Road Initiative: A Key Pillar of the Global Community of Shared Future." October.
- Wang, Dr Christoph NEDOPIL. 2022. "China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2021." *Green Finance & Development Center*.
- Wangke, Humphrey. 2020. "HEALTHSILKROAD: STRATEGI CHINA MEWUJUDKAN AMBISI GEOPOLITIKNYA." *INFO Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*.
- Wendt, Alexander. 2003. "Social Theory of International Politics." *Cambridge Universty Press*.
- Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilhami. 2024. *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*. September 30. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13929272>.
- Yan, xue tong, Daniel Bell, and Zhe Sun. 2011. *Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power*. The Princeton-China Series. Princeton University Press.

- Yan, Xuetong. 2019. *Leadership and the Rise of Great Powers*. Princeton University Press.
- Yan, Xuetong, and Yuanyuan Fang, eds. 2024. *The Essence of Interstate Leadership: Debating Moral Realism*. Bristol University Press.
- Yaqin, Qin, and Chen Zhirui. 2016. "Future in Retrospect: China's Diplomatic History Revisited." *World Century 2*: 22–308.
- Zeng, Jinghan. 2019. "Narrating China's Belt and Road Initiative." *Global Policy* 10 (2): 207–16. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12662>.
- Zhang, Angela Huyue. 2021. *Chinese Antitrust Exceptionalism: How The Rise of China Challenges Global Regulation*. 1st ed. Oxford University PressOxford. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198826569.001.0001>.
- Zhang, Feng. 2013. "The Rise of Chinese Exceptionalism in International Relations." *European Journal of International Relations* 19 (2): 305–28. <https://doi.org/10.1177/1354066111421038>.
- Zhao, Tingyang, and Odd Arne Westad. 2021. *All under Heaven: The Tianxia System for a Possible World Order*. Translated by Joseph E. Harroff. Great Transformations 3. University of California Press.
- Zhu, Kejin, and Rui Yang. 2025. "Deciphering China's Higher Education Outreach Paradigm in Southeast Asia: Can a Neo-Tributary Perspective Work?" *Higher Education* 89 (4): 1041–60. <https://doi.org/10.1007/s10734-024-01260-8>.
- Ziegler, Dominic. 2021. "Vaccine Diplomacy Could Give China's Image a Boost." *The Economist*. <https://www.economist.com/the-world-ahead/2020/11/16/vaccine-diplomacy-could-give-chinas-image-a-boost>.